

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) PADA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN
KASSA KABUPATEN PINRANG**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (SAP) PADA PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN
KASSA KABUPATEN PINRANG**



OLEH

CINTA

NIM: 2220203862202012

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S. Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Cinta

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202012

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor:B-3494/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Rismala, M.Ak

NIDN : 2105118403

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIDN: 19781101 200912 1 003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Cinta

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203862202012

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor:B-3494/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

Tanggal Kelulusan : 07 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Rismala, M.Ak.	(Ketua)	(.....)
Dr. Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)
Indrayani, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP. 19781101 200912 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta melimpahkan taufiqnya dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan sebagai syarat untuk kelulusan dan memperoleh gelar sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah sebagai tugas akhir dari proses pembelajaran mahasiswa pada perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Teristimewa penulis persembahkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ancu dan Ibu Erni, dua orang yang sanga berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka tidak sampai merasakan bangku perkuliahan, namun mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis percaya doa-doa mereka lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit. Sehat selalu dan panjang umur, karena harus selalu ada di setiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis Sarisan, Sofia, dan Dirga seorang kakak dan adik tercinta yang penulis sayangi dan menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini. Penulis berterima kasih atas tawa, doa dan kebersamaan yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rismala, M.Ak. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

2. Bapak Dr. Andi Bahri, M.E. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M. Ak., CTA., ACPA. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Abdul Hamid, S.E, M.M. dan Ibu Indrayani, S.E., M.Ak. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan dan arahannya.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang memberi pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Bapak Rudy Hartono selaku Lurah Kassa beserta jajaran pegawai Kelurahan Kassa yang telah memberikan data yang diperlukan.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Akuntansi Syariah angkatan 2022 yang telah berjuang bersama-sama selama 4 tahun untuk mendapatkan gelar sarjana ini.
11. Nurlia dan Ilnayanti, terima kasih atas kebersamaan, perjuangan, dan saling mendukung satu sama lain. Di balik kata-kata pedas yang selalu dilontarkan satu sama lain, ada hati baik yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kehidupan penulis.
12. “Jamal’s Fams” (Lilis, Dilla, Amel, Mindonk, Arfah, Anggun), perjumpaan kita di bangku perkuliahan adalah anugerah yang tak pernah penulis duga. Kalian bukan sekedar teman, melainkan sahabat yang selalu hadir di setiap fase perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk setiap canda, tawa, suka, sedih, dan diskusi larut malam yang menjadi bagian dari perjuangan yang tidak terasa sendiri. Bersama kalian hari-hari di kampus berubah menjadi cerita yang layak di kenang. Penulis merasa sangat bersyukur dipertemukan oleh orang yang tulus, setia, dan ceria seperti kalian. Terima kasih telah bertahan di sisi penulis di kala banyak masalah

yang dihadapi bersama. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, melampaui jarak, waktu, dan kesibukan yang akan datang.

13. Teruntuk seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muh Amri. Terima kasih telah hadir dan menjadi bagian dari proses perjuangan penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah, menjadi pendengar yang baik, serta selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis disaat lelah dan putus asa. Kehadiran, dukungan, dan ketulusan yang diberikan sangat berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. *Last but not least*, kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit **Cinta**. Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi diluar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Setiap lelah, setiap air mata, dan setiap doa yang terucap dalam diam adalah bukti keteguhan hatimu. Kamu telah melakukan yang terbaik. Teruslah melangkah dengan penuh keyakinan, dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam dirimu. Kamu layak bangga, kamu layak bahagia. Dan hari ini, izinkan penulis berkata: *I'm so proud of you, Cinta*.

Parepare, 11 Juni 2026
25 Dzulhijjah 1446 H

Penulis,



Cinta

NIM: 2220203862202012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cinta
NIM : 2220203862202012
Tempat/Tgl. Lahir : Padanglolo, 24 April 2004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, kecuali tulisan yang sebagai bentuk acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 11 Juni 2026

Penulis,



Cinta
NIM: 2220203862202012

ABSTRAK

CINTA. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh Rismala).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan pada tingkat kelurahan. Kelurahan sebagai perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dituntut menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik penyusunan laporan keuangan, menganalisis kesesuaiannya dengan SAP, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapannya di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Lurah dan Bendahara Kelurahan Kassa. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi dokumen, pencatatan dan penginputan transaksi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Penatausahaan, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan juga telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang meliputi aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti faktor keterbatasan sumber daya manusia, faktor sarana dan prasarana, serta faktor administrasi dan koordinasi.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	v
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK.....	ixi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xivi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teoritis.....	12
1. Akuntansi Sektor Publik	12
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	15
3. Laporan Keuangan Pemerintah.....	22
4. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan SAP.....	35
C. Kerangka Konseptual	39
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	46
F. Uji Keabsahan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan Hasil Penelitian	88
BAB V PENUTUP	115
A. Simpulan	115
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XXX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman Gambar
2.1	Bagan Kerangka Pikir	41



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1	Pedoman Wawancara	II
2	Transkrip Wawancara	VI
3	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	XIII
4	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	XIV
5	Surat Pengantar Penelitian dari Kampus	XV
6	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XVI
7	Surat Keterangan telah Melaksanakan Penelitian	XVII
8	Surat Keterangan Wawancara	XVIII
9	Dokumentasi	XIX
10	Laporan Pertanggungjawaban Kelurahan Kassa	XX
11	Biodata Penulis	XXX

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi dan Singkatan

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- 1) Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>fathah dan yá'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yá'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah*nya itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ	: 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٍّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālāh*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS/:....: 4:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan publik menempati posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Setiap aktivitas pemerintahan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pemilik sumber daya tersebut. Laporan keuangan menjadi instrumen utama dalam menyampaikan informasi mengenai penggunaan sumber daya keuangan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja serta dasar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Kualitas laporan keuangan sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena informasi yang disajikan mencerminkan sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SAP berbasis akrual memberikan perubahan yang signifikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah, karena tidak hanya mencatat transaksi berdasarkan arus kas, tetapi juga memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul. Informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih lengkap dan mampu menggambarkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Penerapan standar ini menuntut aparatur pemerintah untuk memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep akuntansi, termasuk pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi keuangan. Kemampuan tersebut menjadi prasyarat penting agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi

¹ Indrayani, *Modul Akuntansi Sektor Publik* (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.²

Realitas menunjukkan bahwa penerapan SAP belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai temuan di lapangan mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara standar yang telah ditetapkan dengan praktik penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam beberapa kondisi disusun hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap substansi akuntansi. Praktik tersebut menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan kurang mencerminkan kondisi sebenarnya. Kualitas laporan keuangan menjadi kurang optimal, sehingga fungsi laporan sebagai alat akuntabilitas dan transparansi tidak dapat berjalan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan SAP masih menghadapi tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan sikap dan pola kerja aparatur.³

Permasalahan tersebut semakin kompleks pada tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu kelurahan. Kelurahan memiliki posisi yang sangat dekat dengan masyarakat serta menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan publik. Kegiatan pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan. Peran strategis ini menuntut adanya pengelolaan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang disusun oleh kelurahan tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari penggunaan anggaran. Kualitas

² Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan” (Jakarta, 2010).

³ Andi Ayu Frihatni, Nirwana, dan Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 4, No 3 (2021).

laporan keuangan di tingkat kelurahan secara langsung memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.⁴

Kondisi di lapangan menunjukkan adanya berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh aparatur kelurahan dalam menerapkan SAP. Standar akuntansi yang bersifat kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi. Pemahaman yang terbatas terhadap konsep akrual, prosedur pencatatan, serta penyusunan laporan keuangan menyebabkan proses pelaporan tidak berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia juga seringkali diikuti dengan minimnya pelatihan dan pendampingan teknis, sehingga aparatur mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan standar yang berlaku. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko kesalahan pencatatan serta ketidaksesuaian penyajian laporan keuangan.

Fenomena yang muncul menunjukkan adanya kecenderungan bahwa penyusunan laporan keuangan di tingkat kelurahan masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif. Proses penyusunan laporan lebih difokuskan pada kelengkapan dokumen dibandingkan dengan kualitas informasi yang dihasilkan. Laporan keuangan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat untuk menilai kinerja maupun sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini mencerminkan bahwa fungsi substantif dari laporan keuangan belum berjalan secara optimal. Kesenjangan antara konsep ideal yang diatur dalam SAP dengan praktik yang terjadi di lapangan menjadi semakin nyata dan membutuhkan perhatian yang serius.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penerapan basis akrual tersebut terlihat dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang tidak hanya memperhatikan transaksi kas, tetapi juga memperhatikan hak dan kewajiban yang timbul dalam suatu periode pelaporan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi aparatur kelurahan dalam memahami dan mengimplementasikan seluruh ketentuan SAP secara optimal. Pemahaman teknis yang berbeda-beda antar aparatur serta keterbatasan pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan dan efektivitas penerapan SAP di tingkat kelurahan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Nita Sari dan Andi Putra menemukan bahwa penerapan SAP pada pemerintah daerah masih mengalami hambatan, terutama terkait dengan pemahaman aparatur terhadap konsep basis akrual dan keterbatasan kompetensi teknis.⁵ Sementara itu, penelitian oleh Dewi Rahmawati menunjukkan bahwa pada tingkat desa dan kelurahan, penerapan SAP cenderung dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban administratif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep SAP dan realitas implementasinya di lapangan.⁶

Kesenjangan antara ketentuan dan praktik tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti kualitas sumber daya manusia, pemahaman teknis,

⁵ Nita Sari and Andi Putra, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik* 8, no. 1 (2017).

⁶ Dewi Rahmawati, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Desa Dan Kelurahan," *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 5, no. 1 (2020).

serta kesiapan organisasi. Meskipun Kelurahan Kassa telah menerapkan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya, efektivitas penerapan standar tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip SAP telah diterapkan secara konsisten serta faktor-faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian yang komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi penerapan SAP di tingkat kelurahan dan menjadi dasar dalam merumuskan upaya peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi penerapannya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, khususnya pada tingkat kelurahan, serta memperkuat praktik akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang?
2. Apakah praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?
3. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang?

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diformulasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis kesesuaian praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari sisi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu kelurahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan SAP dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan pendekatan kualitatif.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi Pemerintah Kelurahan Kassa: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penyusunan laporan keuangan yang telah berjalan, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparatur kelurahan

dalam upaya meningkatkan kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

- b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas aparatur kelurahan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- c. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kelurahan.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya pada entitas pemerintahan tingkat kelurahan atau desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan bagian penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Penelitian mengenai penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan objek dan pendekatan yang beragam. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan penting dalam memperkuat kerangka teoritis serta melihat posisi kebaruan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Soffiana Safitri tahun 2024 yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Desa Kemuningsari Kidul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan laporan keuangan desa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan meliputi konsep SAP, basis akrual dalam sektor publik, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP di Desa Kemuningsari Kidul belum sepenuhnya sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 karena masih menggunakan basis kas dan hanya menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus analisis penerapan SAP menggunakan pendekatan kualitatif. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat desa, sedangkan penelitian ini dilakukan

pada tingkat kelurahan yang memiliki struktur administrasi dan kewenangan berbeda.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Reski tahun 2024 yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)”. Penelitian ini membahas penerapan SAP berbasis akrual pada Badan Pusat Statistik Parepare berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengelolaan keuangan dan penerapan SAP setelah diberlakukannya PP tersebut serta bagaimana penerapannya ditinjau dari prinsip akuntansi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS Parepare telah menerapkan SAP berbasis akrual dengan baik serta memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain itu, penerapannya juga dinilai sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran dalam akuntansi syariah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian mengenai penerapan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010. Perbedaannya terletak pada objek dan ruang lingkup penelitian, dimana penelitian Reski dilakukan pada instansi vertikal pemerintah pusat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penyusunan laporan keuangan di tingkat kelurahan.⁹

3. Penelitian lain dilakukan oleh Yosi Nopitasari tahun 2022 dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan

⁸ Sinta Soffiana Safitri, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

⁹ RESKI, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

Laporan Operasional Berbasis AkruaI pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif untuk membandingkan penyusunan laporan operasional dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan operasional telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis kesesuaian penerapan SAP berbasis akrual. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada laporan operasional di tingkat dinas kabupaten, sedangkan penelitian ini menganalisis keseluruhan proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat kelurahan.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Jusmani, Edduar Hendri, dan Tomi Bayu Kurniawan tahun 2022 yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP terhadap kualitas penyajian laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan meskipun masih terdapat kendala teknis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas implementasi SAP. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian tersebut menilai kualitas penyajian laporan

¹⁰ Yosi Nopitasari, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis AkruaI Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi” (Universitas Islam Kuantan Singingi, 2022).

keuangan pada sekretariat daerah, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses penyusunan laporan keuangan di tingkat kelurahan.¹¹

5. Penelitian terbaru dilakukan oleh Puji Afriyeni, Mila, Suci Kurniati, dan Nadia Afsari tahun 2024 yang berjudul “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pencatatan Manual Studi Kasus di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bengkalis”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan manual menyebabkan penerapan SAP belum optimal, sehingga berdampak pada transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menilai kesesuaian penerapan SAP. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian, karena penelitian tersebut dilakukan pada KADIN yang bukan merupakan entitas pemerintahan murni, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kelurahan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah.¹²

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada desa, dinas, sekretariat daerah, atau instansi tertentu di tingkat kabupaten/kota, serta sebagian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menganalisis penerapan SAP dalam proses penyusunan laporan keuangan pada tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada

¹¹ Jusmani, Edduar Hendri, and Tomi Bayu Kurniawan, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir,” *Jurnal Mediasi Akuntansi* 4, no. 2 (2022).

¹² Puji Afriyeni et al., “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pencatatan Manual Studi Kasus Di Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Bengkalis,” *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge* 1, no. 3 (2024).

objek penelitian yaitu kelurahan serta pada fokus analisis yang menitikberatkan pada proses penyusunan laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Landasan Teoritis

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan cabang ilmu akuntansi yang memfokuskan kajiannya pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terjadi pada organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga publik lainnya yang menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan sumber daya publik. Karakter utama organisasi sektor publik terletak pada orientasinya yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba, melainkan untuk memberikan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo, akuntansi sektor publik merupakan sistem dan proses penyajian informasi keuangan yang digunakan oleh pemerintah sebagai alat manajemen dalam mengelola sumber daya publik, sekaligus sebagai sarana pertanggungjawaban kepada masyarakat. Akuntansi sektor publik berperan penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, karena melalui laporan keuangan yang disusun, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran serta memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹³

¹³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018) Hal 1-2.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, akuntansi sektor publik digunakan sebagai instrumen untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan yang bersumber dari dana publik, seperti pajak, retribusi, dan transfer pemerintah. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik menekankan aspek pertanggungjawaban, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Perbedaan mendasar dengan akuntansi sektor swasta terlihat pada tujuan pelaporan, pengguna laporan keuangan, serta dasar pengukuran kinerja yang lebih menitikberatkan pada pencapaian tujuan pelayanan publik daripada keuntungan finansial.¹⁴

b. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu bagi berbagai pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal organisasi publik. Informasi keuangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi kinerja pemerintah. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik, pemerintah dapat mengelola sumber daya keuangan secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.¹⁵

Selain itu, tujuan penting akuntansi sektor publik adalah untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara terbuka kepada masyarakat, lembaga legislatif, dan lembaga pengawas. Melalui laporan keuangan yang disusun secara sistematis dan sesuai standar, pemerintah dapat menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah

¹⁴ Tulis S. Meliala, Noko Silitonga, and Timbul Sinaga, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Semesta Media, 2007).

¹⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018) Hal 18-19.

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, akuntansi sektor publik menjadi sarana utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁶

c. Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah untuk mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran kepada publik. Melalui sistem akuntansi sektor publik, seluruh transaksi keuangan dicatat secara sistematis dan didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat ditelusuri serta diuji kebenarannya melalui proses audit.¹⁷

Di sisi lain, transparansi keuangan menuntut adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai sumber, penggunaan, dan hasil pengelolaan dana publik. Akuntansi sektor publik memungkinkan penyajian laporan keuangan yang jelas dan terstruktur, sehingga informasi keuangan dapat dipahami oleh berbagai kelompok pengguna, termasuk masyarakat umum. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan juga mendorong keseragaman dan keterbandingan informasi keuangan antarperiode dan antarentitas pemerintah.¹⁸

Dengan demikian, akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen

¹⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2010).

¹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018).

¹⁸ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Melalui penerapan akuntansi sektor publik yang konsisten dan berkualitas, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan dan perihal mempraktikkan. Konsep penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah perbuatan menerapkan. Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain adalah hal, cara atau hasil.¹⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, penerapan adalah pelaksanaan strategi yang tepat yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang objektif sehingga dalam melaksanakan penerapan diperlukan keterampilan yang sesuai dengan yang harus dilakukan pimpinan dan berhubungan dengan masalah yang akan dihadapi. Dalam hal ini dibutuhkan konsep yang lebih terarah dan metode yang terfokus pada upaya pemecahan masalah, sehingga akan terwujud hasil yang diinginkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip, konsep, dan aturan akuntansi yang digunakan sebagai pedoman resmi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP dirancang secara khusus untuk menjawab karakteristik pengelolaan keuangan sektor publik yang berbeda dengan sektor swasta, terutama dalam hal tujuan pelaporan, jenis transaksi, serta orientasi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, SAP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis akuntansi,

¹⁹ J.S Badudu and Sutan Mohammad Zain, *Efektivitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah.²⁰

Keberadaan SAP menjadi landasan penting dalam menciptakan keseragaman praktik akuntansi di seluruh entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keseragaman tersebut memungkinkan laporan keuangan pemerintah disusun secara sistematis, dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas, serta lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Dengan demikian, SAP berperan dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik serta mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.²¹

a. Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah agar mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Informasi yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pengelolaan keuangan pemerintah, baik oleh internal pemerintah maupun oleh pihak eksternal seperti masyarakat dan lembaga pengawas.²²

Selain itu, penerapan SAP bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Melalui penerapan standar yang baku, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan secara terbuka dan dapat diaudit. Hal ini memungkinkan penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan secara jelas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja

²⁰ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2010) Hal 19.

²¹ Deddi Nordiawan and Ayuningtyas Herianti, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

²² Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2016).

pemerintah dapat ditingkatkan. Dengan demikian, SAP menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).²³

b. Dasar Hukum Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan ini menetapkan bahwa seluruh entitas pemerintah, baik pusat maupun daerah, wajib menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan. PP No. 71 Tahun 2010 juga menegaskan penggunaan basis akrual sebagai dasar pengakuan dan pelaporan transaksi keuangan pemerintah.²⁴

Ditetapkannya peraturan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi pengelolaan keuangan negara. Penerapan SAP berbasis akrual diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih lengkap dan mencerminkan kondisi keuangan pemerintah secara nyata. Dengan landasan hukum yang jelas, penerapan SAP memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan dan pelaporan keuangan.²⁵

c. Prinsip-prinsip Dasar Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan disusun berdasarkan prinsip-prinsip dasar akuntansi sektor publik, antara lain prinsip akuntabilitas, transparansi, konsistensi, keandalan, dan keterbandingan. Prinsip akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk

²³ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Salemba Empat, 2010) Hal 22.

²⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

²⁵ Deddi Nordiawan and Ayuningtyas Herianti, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018) Hal 39.

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat. Prinsip transparansi mengharuskan informasi keuangan disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh publik.²⁶

Prinsip konsistensi menuntut penerapan kebijakan akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya agar laporan keuangan dapat dibandingkan. Prinsip keandalan mengharuskan informasi keuangan bebas dari kesalahan material dan bias, sedangkan prinsip keterbandingan memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah antarperiode dan antarentitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai informatif dan evaluatif yang tinggi.²⁷

d. Basis Akuntansi dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 menggunakan basis akrual sebagai dasar pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah. Basis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadinya transaksi atau peristiwa ekonomi, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pengeluaran kas. Pendekatan ini berbeda dengan basis kas yang hanya mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan.²⁸

Penerapan basis akrual bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai posisi keuangan dan kinerja pemerintah. Dengan basis akrual, laporan keuangan mampu menyajikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah secara lebih lengkap, termasuk kewajiban jangka panjang dan pemanfaatan aset pemerintah.

²⁶ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2016) Hal 21.

²⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Jakarta: Erlangga, 2010).

²⁸ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan rasional.²⁹

e. Bentuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Praktik

Bentuk penerapan SAP dalam praktik dapat dilihat dari beberapa aspek utama, antara lain penggunaan basis akrual dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, penerapan klasifikasi akun sesuai dengan ketentuan SAP, serta penyusunan laporan keuangan yang lengkap dan sistematis. Penerapan SAP juga tercermin dari konsistensi penggunaan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya sehingga informasi keuangan dapat dibandingkan secara berkelanjutan.

Penerapan SAP dalam praktik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga memerlukan pemahaman konseptual aparatur pemerintah terhadap tujuan dan manfaat SAP.³⁰ Tanpa pemahaman yang memadai, penerapan SAP berpotensi bersifat administratif semata dan belum sepenuhnya mencerminkan substansi akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

Dalam penelitian kualitatif, bentuk penerapan SAP dapat dianalisis melalui praktik pencatatan keuangan, proses penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian laporan yang dihasilkan dengan ketentuan SAP yang berlaku di tingkat pemerintahan, termasuk pada pemerintah kelurahan.

f. Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

²⁹ Deddi Nordiawan and Ayuningtyas Herianti, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

³⁰ Abdul Halim, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) Hal 31-32.

Pemerintahan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Keempat aspek ini menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian penerapan SAP pada entitas pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan kelurahan.

1) Pengakuan

Pengakuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan proses penetapan suatu transaksi atau peristiwa keuangan untuk dicatat dalam laporan keuangan karena telah memenuhi definisi dan kriteria tertentu sebagai unsur laporan keuangan. Dalam SAP berbasis akrual, pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan semata-mata pada saat kas diterima atau dibayarkan. Kerangka Konseptual SAP menegaskan bahwa suatu unsur laporan keuangan diakui apabila memenuhi definisi unsur tersebut serta dapat diukur secara andal. Oleh karena itu, ketepatan waktu dan ketepatan dasar pencatatan transaksi menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian penerapan SAP. Dalam konteks penelitian, aspek pengakuan dapat dianalisis dengan melihat apakah pencatatan transaksi keuangan pada kelurahan telah sesuai dengan prinsip akrual sebagaimana diatur dalam SAP.

2) Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai rupiah atas suatu transaksi atau unsur laporan keuangan yang diakui. Dalam SAP, pengukuran umumnya menggunakan dasar biaya perolehan (historical cost), kecuali apabila standar menentukan dasar pengukuran lain. Pengukuran yang tepat sangat menentukan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan karena berkaitan

dengan kewajaran nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. SAP mengharuskan bahwa setiap unsur laporan keuangan harus dapat diukur secara andal agar informasi yang dihasilkan tidak menyesatkan pengguna laporan. Dalam penelitian, indikator pengukuran dapat dilihat dari bagaimana entitas pemerintah menentukan nilai aset tetap, mencatat belanja, serta mengakui kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SAP.

3) Penyajian

Penyajian dalam SAP berkaitan dengan tata cara penyusunan dan penampilan laporan keuangan sesuai dengan struktur, klasifikasi, dan format yang telah ditetapkan. SAP mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara sistematis dan lengkap, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Penyajian yang sesuai standar bertujuan untuk menciptakan keterbandingan antarperiode dan antarentitas serta meningkatkan kejelasan informasi yang disampaikan kepada pengguna laporan keuangan. Dalam penelitian, indikator penyajian dapat dianalisis melalui kelengkapan komponen laporan keuangan serta kesesuaiannya dengan format yang diatur dalam SAP.

4) Pengungkapan

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi tambahan yang diperlukan agar laporan keuangan dapat dipahami secara memadai oleh pengguna. Dalam SAP, pengungkapan dilakukan melalui Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian akun tertentu, serta informasi penting lainnya yang tidak dapat disajikan secara rinci dalam laporan utama. Pengungkapan yang

memadai akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian, indikator pengungkapan dapat dianalisis dengan melihat apakah laporan keuangan telah disertai CaLK yang memadai serta apakah informasi yang diungkapkan telah sesuai dengan ketentuan dalam SAP.³¹

3. Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh entitas pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan ini disusun untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas pemerintah, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pengelolaan sumber daya publik. Keberadaan laporan keuangan pemerintah menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan pemerintah didefinisikan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Ketentuan ini menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara sistematis, berdasarkan prinsip dan standar akuntansi yang telah ditetapkan, agar informasi yang disajikan bersifat wajar, andal, dan dapat dibandingkan antarperiode maupun antarentitas pemerintah.³²

³¹ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

³² “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Laporan keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan administratif, tetapi juga sebagai sarana utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga legislatif, lembaga pengawas, serta masyarakat, untuk mengevaluasi tingkat efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

Selain itu, laporan keuangan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan publik. Melalui laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah dituntut untuk menyajikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, sehingga penggunaan dana negara dan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

a. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah disusun dengan tujuan utama untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan kinerja pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diharapkan mampu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut SAP, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan, serta untuk menunjukkan kemampuan

pemerintah dalam membiayai kegiatan dan memenuhi kewajibannya.³⁴ Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan pemerintah pada akhir periode pelaporan.

Mardiasmo menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sektor publik, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana pemerintah telah menjalankan amanat yang diberikan.³⁵

b. Fungsi Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan pemerintah memiliki beberapa fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas pengelolaan keuangan negara atau daerah. Kedua, laporan keuangan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan pemerintah dalam satu periode tertentu.

Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai sarana pengendalian dan perencanaan keuangan pemerintah. Halim dan Kusufi menjelaskan bahwa melalui laporan keuangan, pemerintah dapat menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta merencanakan kebijakan keuangan di masa mendatang.³⁶ Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam proses pengambilan keputusan.

³⁴ “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

³⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2018) Hal 14.

³⁶ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

c. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur bahwa laporan keuangan pemerintah harus disusun secara lengkap dan sistematis agar mampu menyajikan informasi yang memadai mengenai kondisi keuangan dan kinerja pemerintah. Komponen laporan keuangan pemerintah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna laporan, baik internal maupun eksternal, dalam rangka pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban publik.³⁷

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan ini memuat informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang telah direalisasikan oleh pemerintah. Dengan adanya perbandingan antara anggaran dan realisasi, LRA dapat menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu melaksanakan rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Nordiawan dan Hertianti, LRA berfungsi sebagai alat pengendalian anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Melalui LRA, dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga laporan ini menjadi salah satu instrumen utama akuntabilitas keuangan pemerintah. Selain itu, LRA juga membantu pemangku kepentingan dalam menilai kepatuhan

³⁷ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari awal hingga akhir periode. Laporan ini mulai diwajibkan setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 belum diatur secara terpisah. LPSAL membantu menunjukkan kenaikan atau penurunan SAL dibandingkan tahun sebelumnya serta menggambarkan posisi sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan kembali.

Isi LPSAL meliputi saldo awal, SiLPA atau SiKPA tahun berjalan, koreksi kesalahan periode sebelumnya, serta saldo akhir. Informasi ini penting karena SAL dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada periode berikutnya. Dengan adanya LPSAL, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah menjadi lebih jelas, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan anggaran selanjutnya.

3) Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada tanggal tertentu, yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Neraca memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah serta kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga dapat menggambarkan kondisi keuangan pemerintah secara menyeluruh pada akhir periode pelaporan.

Ritonga menyatakan bahwa neraca pemerintah sangat penting untuk menilai solvabilitas dan likuiditas pemerintah, serta

kemampuan pemerintah dalam mengelola aset dan kewajibannya. Penyajian neraca berbasis akrual memungkinkan informasi keuangan disajikan secara lebih komprehensif dan andal. Dengan demikian, neraca dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah di masa mendatang.

4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang arus masuk dan arus keluar kas melalui kas umum negara atau kas daerah selama satu periode pelaporan. Laporan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai bagian dari komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Melalui laporan ini, dapat diketahui bagaimana pemerintah mengelola kas untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Arus Kas biasanya diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Informasi ini tidak hanya menunjukkan jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, laporan ini menjadi alat penting dalam evaluasi kinerja dan perencanaan keuangan di periode mendatang.

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan beban pemerintah berbasis akrual dalam satu periode pelaporan. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja operasional pemerintah yang sesungguhnya, karena seluruh transaksi ekonomi diakui pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan arus kas. Dengan demikian, laporan operasional mampu

mencerminkan aktivitas operasional pemerintah secara lebih komprehensif.

Menurut Bastian, Laporan Operasional berperan penting dalam menilai kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara berkelanjutan. Surplus atau defisit operasional yang disajikan dalam laporan operasional mencerminkan hasil kegiatan operasional pemerintah selama periode tertentu. Informasi ini penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi apakah kegiatan operasional yang dilaksanakan telah berjalan secara efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan ekuitas pemerintah selama satu periode pelaporan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh surplus atau defisit operasional, koreksi kesalahan periode sebelumnya, serta transaksi lain yang memengaruhi ekuitas. Laporan ini membantu menjelaskan dinamika perubahan posisi keuangan pemerintah dari awal hingga akhir periode.

Menurut Sujarweni, laporan perubahan ekuitas membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan posisi keuangan pemerintah secara menyeluruh. Dengan demikian, laporan perubahan ekuitas berfungsi sebagai pelengkap informasi yang disajikan dalam neraca dan laporan operasional, serta memperjelas hubungan antara kinerja operasional dan posisi keuangan pemerintah.

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan pemerintah yang berisi penjelasan rinci atas pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan utama. CaLK juga

memuat informasi mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan serta penjelasan atas penyimpangan atau kendala dalam penerapan SAP. Informasi dalam CaLK bersifat naratif dan kuantitatif untuk memperjelas angka-angka dalam laporan keuangan.

Menurut Darise, CaLK berfungsi untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dengan memberikan penjelasan yang memadai agar laporan keuangan dapat dipahami secara utuh oleh pengguna. Oleh karena itu, CaLK menjadi sarana penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah, khususnya dalam menjelaskan kebijakan akuntansi dan kondisi yang memengaruhi penyajian laporan keuangan.³⁸

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 41-55 yaitu:

- a) Prinsip Basis Akuntansi, yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.
- b) Prinsip Nilai Historis, aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- c) Prinsip Realisasi, bagi pemerintah pendapatan basis kas yang tersedia telah di otoritas kan melalui anggaran pemerintah suatu

³⁸ Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).

periode akuntansi dan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah otorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas.

- d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal, informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.
- e) Prinsip Priodisitas, kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan namun periode bulanan, triwulan dan semester juga dianjurkan.
- f) Prinsip Konsistensi, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh entitas pelaporan. Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari suatu metode akuntansi ke metode lainnya.
- g) Prinsip Pengungkapan Lengkap, laporan keuangan disajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna informasi laporan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

- h) Prinsip Penyajian Wajar, laporan keuangan menyajikan secara wajar laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.³⁹

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, diperbolehkan menggunakan basis kas menuju akrual dalam jangka waktu tertentu setelah tahun anggaran 2010, kebijakan ini diberikan untuk daerah yang belum siap sepenuhnya dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Namun, saat ini setiap daerah sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual karena telah lebih dari empat tahun anggaran yang merupakan tanggal efektif dalam penerapannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah ini digunakan oleh semua lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menerapkan SAP Berbasis Akrual peraturan pelaksanaan dan sistem akuntansi akan berubah begitu juga dengan kapasitas SDM harus ditingkatkan, karena SAP Berbasis Akrual memang memberikan informasi keuangan yang lebih baik tetapi implementasinya lebih rumit dibandingkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual.

- d. Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Penyusunan laporan keuangan pemerintah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan konsisten agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Proses ini diawali dengan pencatatan

³⁹ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) Hal 39-40.

transaksi keuangan berdasarkan bukti transaksi yang sah dan dapat diverifikasi, seperti kuitansi, nota, dan dokumen pendukung lainnya. Pencatatan yang akurat menjadi dasar utama dalam sistem akuntansi pemerintah karena setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dapat ditelusuri kembali sumber dan penggunaannya.

Tahapan selanjutnya adalah pengklasifikasian transaksi keuangan, yaitu pengelompokan transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengklasifikasian ini bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan data keuangan serta memastikan bahwa setiap transaksi dicatat pada pos yang tepat. Setelah itu dilakukan pengikhtisaran data keuangan, yang meliputi penyusunan jurnal dan buku besar, serta penyusunan neraca saldo sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Tahapan penyusunan laporan keuangan pemerintah meliputi pencatatan transaksi keuangan, penyusunan jurnal dan buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyusunan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan¹. Setiap tahapan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena kesalahan pada satu tahapan akan berdampak pada tahapan berikutnya dan berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Lebih lanjut, laporan keuangan pemerintah yang disusun pada akhir periode pelaporan harus mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja pemerintah secara wajar. Oleh karena itu, konsistensi dalam pelaksanaan setiap tahapan penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting. Penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara tertib dan sesuai dengan SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat.⁴⁰

e. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Penyusunan laporan keuangan pemerintah melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan struktur pengelolaan keuangan pemerintah. Pihak-pihak tersebut antara lain pejabat pengelola keuangan, bendahara, serta unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi, mulai dari pelaksanaan pencatatan transaksi, pengelolaan kas, hingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keterlibatan berbagai pihak ini menuntut adanya pembagian tugas yang jelas agar setiap proses dapat berjalan secara tertib dan terkontrol.

Keberhasilan penyusunan laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh kompetensi aparatur yang terlibat serta kejelasan pembagian tugas dan wewenang. Aparatur yang memahami prinsip dan ketentuan SAP akan lebih mampu menyusun laporan keuangan secara tepat dan sesuai standar. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antarunit kerja menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu, sekaligus meminimalkan kesalahan pencatatan serta meningkatkan

⁴⁰ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Indeks, 2009) Hal 72-73.

kualitas informasi keuangan yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.⁴¹

f. Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat pemahaman aparatur terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta lemahnya sistem pengendalian internal. Keterbatasan sumber daya manusia dapat terlihat dari jumlah aparatur yang belum sebanding dengan beban kerja pengelolaan keuangan, maupun dari kurangnya latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang akuntansi pemerintahan. Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya ketertiban administrasi keuangan. Kendala-kendala tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada menurunnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Menurut Mahsun, kendala dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dapat mengakibatkan informasi keuangan yang disajikan menjadi kurang relevan, kurang andal, serta tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga kurang optimal sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, penyusunan prosedur kerja yang jelas, serta penguatan sistem akuntansi dan pengendalian internal

106. ⁴¹ Irfan Ritonga, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017) Hal

pemerintah agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan SAP.⁴²

4. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, dalam praktiknya, khususnya pada tingkat pemerintahan seperti kelurahan, penerapan SAP seringkali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal yang memengaruhi kinerja aparatur dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi pengetahuan, keterampilan teknis, maupun pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kemampuan tersebut menjadi sangat penting karena SAP mengharuskan adanya ketelitian dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, hingga penyajian laporan keuangan secara sistematis dan sesuai standar.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat aparatur di tingkat kelurahan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi atau keuangan. Keterbatasan tersebut

⁴² Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2013) Hal 97-98.

berdampak pada rendahnya pemahaman terhadap konsep dasar akuntansi, seperti pengakuan dan pengukuran transaksi keuangan. Jumlah aparatur yang terbatas juga menyebabkan terjadinya rangkap tugas, sehingga beban kerja menjadi tidak seimbang dan berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang sangat penting dalam menunjang penerapan SAP secara optimal. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan menjadi kebutuhan utama, terutama dalam mempercepat proses pencatatan, pengolahan data, serta penyusunan laporan keuangan. Sistem yang terintegrasi dapat membantu meminimalisir kesalahan serta meningkatkan efisiensi kerja aparatur dalam mengelola keuangan daerah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh kelurahan, seperti jumlah komputer yang terbatas, perangkat yang kurang memadai, serta akses internet yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan proses pengolahan data keuangan menjadi kurang efektif dan cenderung dilakukan secara manual. Penggunaan aplikasi keuangan yang belum optimal juga menjadi kendala, sehingga meningkatkan risiko kesalahan pencatatan serta keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan.⁴³

c. Kurangnya Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan penerapan SAP, terutama dalam meningkatkan pemahaman aparatur terhadap sistem akuntansi

⁴³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018).

berbasis akrual. Perubahan dari basis kas menuju basis akrual memerlukan penyesuaian yang tidak sederhana, sehingga aparatur membutuhkan pembekalan yang memadai agar dapat memahami dan menerapkan standar tersebut dengan baik.

Kurangnya frekuensi pelatihan serta tidak meratanya kesempatan bagi aparatur untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis menyebabkan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian aparatur mungkin telah memahami SAP dengan baik, sementara yang lain masih mengalami kesulitan dalam penerapannya. Kondisi ini menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penyusunan laporan keuangan serta menyulitkan dalam menjaga kualitas laporan agar tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

d. Kompleksitas Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi, terutama dalam hal pengakuan, pengukuran, serta penyajian berbagai jenis laporan keuangan. Aparatur dituntut untuk memahami hubungan antar komponen laporan keuangan serta mampu menyusun laporan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kompleksitas ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi SAP di tingkat pemerintahan yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Kesulitan dalam memahami istilah teknis dan prosedur pencatatan seringkali menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penerapan SAP. Perubahan regulasi yang terjadi secara berkala juga menambah tingkat kesulitan dalam memahami standar tersebut. Aparatur dituntut untuk terus mengikuti perkembangan terbaru, yang

dalam praktiknya tidak selalu mudah dilakukan tanpa dukungan pelatihan dan pendampingan yang memadai.⁴⁴

e. Keterbatasan Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerapan SAP berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Melalui pengawasan yang efektif, kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Evaluasi yang dilakukan secara berkala juga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan pengawasan di tingkat kelurahan seringkali belum berjalan secara optimal. Keterbatasan sumber daya pengawas serta kurangnya intensitas monitoring menyebabkan proses evaluasi tidak dilakukan secara maksimal. Kondisi ini mengakibatkan kesalahan dalam penerapan SAP tidak segera terdeteksi, sehingga berpotensi terus berulang dan berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

f. Budaya Organisasi dan Resistensi terhadap Perubahan

Penerapan SAP berbasis akrual merupakan suatu bentuk perubahan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Perubahan ini menuntut adanya kesiapan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan sistem yang baru, termasuk dalam hal peningkatan kompetensi serta perubahan kebiasaan kerja.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua aparatur dapat dengan mudah menerima perubahan tersebut. Masih terdapat

⁴⁴ Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*.

kecenderungan untuk mempertahankan cara kerja lama yang dianggap lebih sederhana. Sikap resistensi terhadap perubahan dapat terlihat dari rendahnya motivasi untuk mempelajari sistem baru serta kurangnya inisiatif dalam meningkatkan kemampuan. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan SAP secara optimal.⁴⁵

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan dasar pemikiran yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Melalui kerangka konseptual, arah analisis dan fokus penelitian dapat dipahami secara jelas dan terstruktur. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual disusun untuk menjelaskan hubungan antara konsep Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyusunan laporan keuangan pemerintah, serta akuntabilitas dan transparansi keuangan pada tingkat pemerintahan kelurahan. Setiap konsep dijabarkan secara deskriptif berdasarkan teori akuntansi sektor publik dan pendapat para ahli yang relevan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan analisis terhadap praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.⁴⁶

1. Konsep Penerapan

Pengertian dari Penerapan atau Implementasi di dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Penerapan adalah sebuah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari dan dilakukan ke dalam sebuah situasi kongkret atau nyata. Menurut Majone dan wildavski mendefinisikan implementasi sebagai penilaian. Browne dan Wildavski juga mengemukakan pendapatnya bahwa Implementasi sebagai bentuk perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan. Dalam penelitian yang dimaksud dengan penerapan adalah

⁴⁵ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).

penerapan standar akuntansi pemerintahan. Peneliti mengkaji tentang bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan pada penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.⁴⁷

2. Konsep Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP berfungsi sebagai pedoman bagi entitas pemerintah dalam mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan bersifat seragam, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Dengan diterapkannya SAP, pemerintah diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat.⁴⁸

3. Konsep Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan proses sistematis yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian transaksi keuangan dalam satu periode pelaporan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga laporan yang dihasilkan mampu mencerminkan kondisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja pemerintah secara wajar dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, laporan keuangan disusun oleh aparatur kelurahan sebagai bagian dari entitas pemerintah daerah yang memuat informasi mengenai penggunaan anggaran, pengelolaan aset, serta kewajiban yang timbul dari pelaksanaan

⁴⁷ JF. Glastra van Loon dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁴⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018).

kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan dan andal sebagai sarana pertanggungjawaban kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat sekaligus sebagai alat evaluasi kinerja keuangan serta wujud transparansi dalam pengelolaan dana publik.⁴⁹

4. Hubungan Antar Konsep

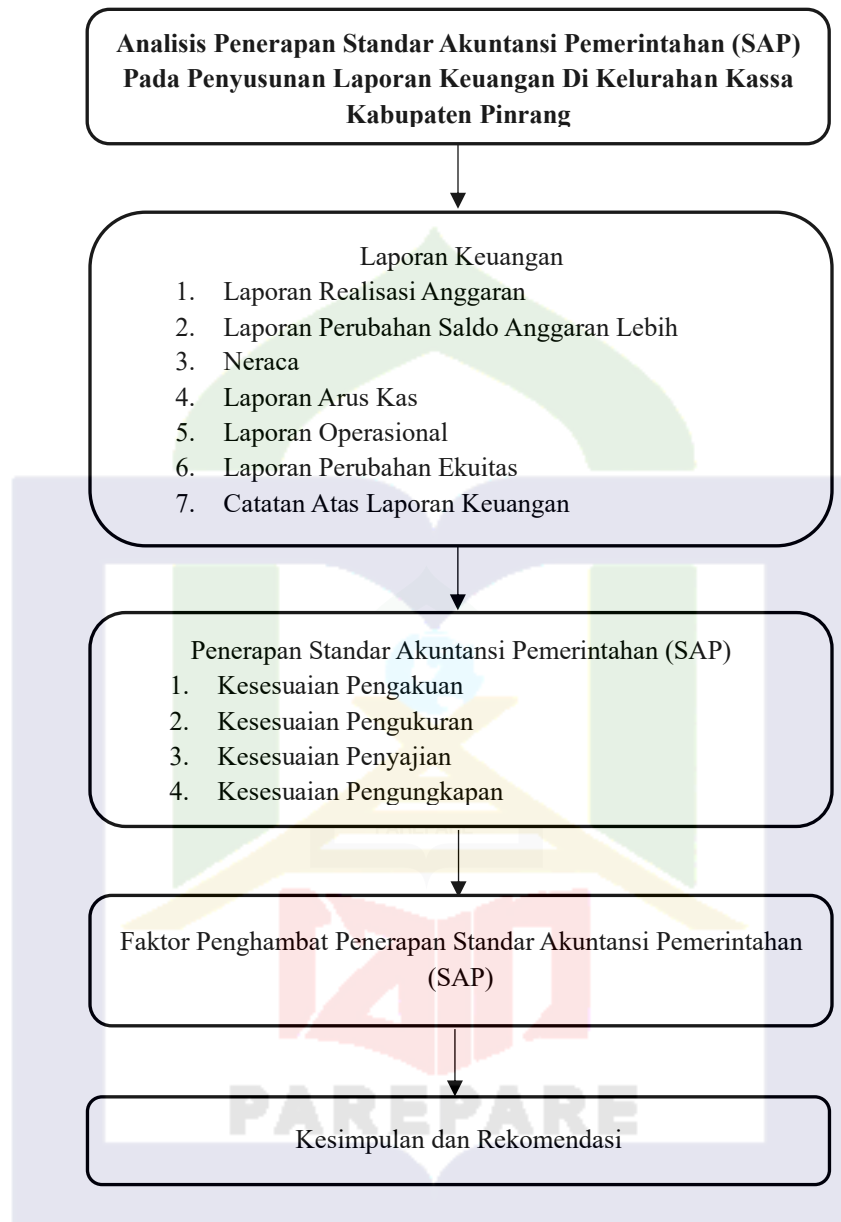
Secara konseptual, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diwujudkan melalui proses penyusunan laporan keuangan pemerintah yang sistematis dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Artinya, kualitas penyusunan laporan keuangan di Kelurahan mencerminkan sejauh mana SAP telah diterapkan dengan baik. Semakin sesuai proses penyusunan laporan keuangan dengan prinsip SAP, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling berkaitan secara hierarkis. SAP sebagai standar, penerapan sebagai proses implementasi, dan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk nyata hasil implementasi tersebut.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah alur logis yang menggambarkan hubungan antara teori, konsep, dan variabel yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan cara peneliti memahami dan memecahkan masalah yang diteliti. Kerangka ini menunjukkan bagaimana teori-teori yang relevan dijadikan dasar dalam melihat fenomena yang di lapangan serta bagaimana konsep-konsep tersebut saling berhubungan dalam menjawab rumusan masalah. Dengan demikian, kerangka pikir berfungsi sebagai panduan atau peta pemikiran yang mengarahkan peneliti dari landasan teori menuju analisis dan penarikan kesimpulan penelitian.⁵⁰

⁴⁹ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah Kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang, yang menjadi objek kajian dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada penyusunan laporan keuangan kelurahan.⁵¹

Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data empiris mengenai proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh aparatur kelurahan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan SAP. Penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami praktik yang terjadi secara aktual, termasuk kendala dan faktor pendukung dalam penerapan SAP pada tingkat pemerintahan kelurahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan, bukan untuk mengukur variabel secara kuantitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemaknaan, pemahaman proses, serta interpretasi terhadap praktik akuntansi yang dijalankan oleh aparatur pemerintah.

Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif bagaimana penerapan SAP dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa, meliputi tahapan pencatatan, penyusunan laporan keuangan, serta bentuk kepatuhan terhadap prinsip dan ketentuan SAP yang berlaku. Data

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) Hal 205.

yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dalam SAP dengan praktik akuntansi yang diterapkan di lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Kassa, yang beralamat di Jl. Poros Bilajeng, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan kesesuaian lokasi dengan fokus dan tujuan penelitian. Kelurahan Kassa dipilih karena merupakan entitas pemerintahan tingkat kelurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan kelurahan.

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Rentang waktu tersebut mencakup tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan aparatur kelurahan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, pengumpulan dokumen laporan keuangan, serta tahap analisis data dan penyusunan hasil penelitian. Perencanaan waktu ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman data dan proses pemahaman fenomena secara menyeluruh.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini membatasi kajian pada bagaimana aparatur kelurahan melaksanakan pencatatan, pengolahan, dan penyajian data keuangan yang berkaitan dengan kegiatan operasional pemerintahan kelurahan dalam satu periode anggaran. Fokus tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai praktik akuntansi yang diterapkan di tingkat kelurahan sebagai unit pemerintahan terdepan dalam pelayanan publik.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menelaah penerapan SAP berdasarkan empat indikator utama, yaitu kesesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Aspek pengakuan dianalisis untuk mengetahui ketepatan waktu dan dasar pencatatan transaksi keuangan. Aspek pengukuran dikaji untuk menilai ketepatan penentuan nilai atas transaksi dan aset yang dicatat. Aspek penyajian difokuskan pada kelengkapan serta kesesuaian format laporan keuangan yang disusun. Sementara itu, aspek pengungkapan dianalisis melalui keberadaan dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atau dokumen pendukung lainnya. Melalui keempat indikator tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai tingkat kesesuaian penerapan SAP pada penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif, mendalam, serta saling melengkapi dalam menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa, Kabupaten Pinrang. Data primer memberikan gambaran empiris mengenai praktik yang terjadi di lapangan, sedangkan data sekunder berfungsi sebagai pendukung dan pembanding terhadap temuan lapangan.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian melalui interaksi peneliti dengan subjek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan aparatur kelurahan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan.

Informan penelitian meliputi Lurah, Sekretaris Kelurahan, Bendahara, serta staf yang menangani administrasi dan keuangan kelurahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui penelaahan berbagai dokumen resmi dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.

Data sekunder meliputi laporan keuangan kelurahan, laporan pertanggungjawaban kegiatan operasional, buku kas umum, arsip transaksi keuangan, serta dokumen administratif lain yang relevan. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta pedoman teknis pelaporan keuangan di tingkat kelurahan.⁵²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan dan pencatatan keuangan di Kantor Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Melalui observasi ini, peneliti mengamati bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dilaksanakan, mulai dari

⁵² Emzir, *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hal 129.

pencatatan transaksi keuangan, pengarsipan bukti transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir periode pelaporan. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti memperoleh data faktual mengenai penerapan SAP secara nyata di lapangan, termasuk pola kerja aparatur, alur pencatatan keuangan, serta kesesuaian prosedur yang diterapkan dengan ketentuan Standar Akutans Pemerintahan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu Lurah, Sekretaris Kelurahan, Bendahara, dan staf yang menangani administrasi keuangan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai pemahaman aparatur terhadap SAP, proses penyusunan laporan keuangan, kendala yang dihadapi dalam penerapan SAP, serta upaya yang dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi-terstruktur, sehingga peneliti memiliki pedoman pertanyaan yang disesuaikan dengan fokus penelitian, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menyampaikan penjelasan secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan pengalaman dan praktik yang dijalankan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa. Dokumen tersebut meliputi laporan keuangan kelurahan, laporan pertanggungjawaban kegiatan operasional, buku kas umum, bukti transaksi keuangan, serta peraturan dan pedoman terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta untuk menilai tingkat kesesuaian

antara praktik penyusunan laporan keuangan dengan ketentuan SAP yang berlaku.⁵³

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses yang dilakukan peneliti setelah pengumpulan data untuk menata, menyiapkan, dan mengelola data secara sistematis agar siap dianalisis. Pengolahan data bertujuan untuk membuat data yang masih mentah menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung proses analisis serta menghasilkan temuan penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

a. Transkripsi Data

Transkripsi adalah proses mengubah data hasil wawancara, rekaman suara, atau catatan lapangan ke dalam bentuk tulisan secara lengkap dan sistematis. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dibaca, dipahami, dan dianalisis lebih lanjut tanpa kehilangan makna asli dari informasi yang disampaikan informan.

b. Pengorganisasian Data

Pengorganisasian data merupakan kegiatan menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan sumber, waktu, tema, atau kategori tertentu. Tujuannya agar data tersusun rapi, tidak tercampur, dan memudahkan peneliti dalam menelusuri kembali informasi yang dibutuhkan saat proses analisis.

c. Pengenalan/Pemahaman Data (*Reading and Familiarizing*)

Tahap ini dilakukan dengan membaca dan menelaah seluruh data secara berulang untuk memahami isi, konteks, dan makna yang terkandung di dalamnya. Melalui proses ini, peneliti mulai menemukan pola, isu penting, atau informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

⁵³ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014) Hal 172.

d. *Koding (Coding)*

Koding adalah proses pemberian tanda, simbol, atau kode pada bagian-bagian data yang dianggap penting atau relevan dengan penelitian. Kode tersebut membantu peneliti dalam mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu sehingga mempermudah proses analisis dan penarikan kesimpulan.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi dan fakta yang terjadi di lapangan. Keabsahan data diperlukan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui uji statistik, melainkan melalui pengujian tingkat kepercayaan terhadap data dan temuan penelitian. Keabsahan data dapat diuji melalui beberapa teknik utama, yaitu:

1. *Kredibilitas (Credibility)*

Kredibilitas berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data penelitian. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas antara lain melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumen pendukung. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang informasi kepada informan (member check) untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

2. *Transferabilitas (Transferability)*

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan atau diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa. Untuk mendukung transferabilitas, peneliti menyajikan uraian yang jelas dan rinci mengenai latar belakang penelitian, kondisi Kelurahan Kassa, serta proses penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyusunan

laporan keuangan, sehingga pembaca dapat menilai relevansi hasil penelitian ini dengan konteks lain.

3. Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi proses penelitian. Dalam penelitian ini, dependabilitas dijaga dengan mendokumentasikan seluruh tahapan penelitian secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, hingga analisis data. Dengan adanya dokumentasi yang jelas, proses penelitian dapat ditelusuri dan diuji kembali oleh pihak lain.

4. Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Konfirmabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar didasarkan pada data yang diperoleh, bukan pada pendapat atau kepentingan peneliti. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menyimpan catatan lapangan, transkrip wawancara, serta dokumen pendukung sebagai bukti empiris yang memperkuat hasil penelitian.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis secara sistematis untuk memahami secara mendalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018) Hal 218.

Langkah-langkah analisis data menurut Sugiyono sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengabstrakan data kasar yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan praktik pencatatan keuangan, proses penyusunan laporan keuangan, serta kesesuaian penerapannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Data yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian disisihkan, sehingga data yang dianalisis benar-benar fokus dan bermakna. Tahap reduksi data membantu peneliti untuk mengorganisasikan data lapangan agar lebih terstruktur dan mudah dianalisis secara mendalam.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi data selesai. Data yang telah diseleksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel sederhana, atau matriks deskriptif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari praktik penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa. Melalui penyajian data yang sistematis, peneliti dapat melihat secara jelas kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan SAP yang berlaku.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil interpretasi data yang telah direduksi dan disajikan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara hati-hati dengan terus melakukan verifikasi terhadap data lapangan agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kesimpulan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan di

Kelurahan Kassa, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan aparatur kelurahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan.⁵⁵



⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) Hal 243.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bagian hasil penelitian ini, peneliti menyajikan temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga pembahasan disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dideskripsikan secara naratif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik penyusunan laporan keuangan, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian ini akan dibahas berdasarkan masing-masing rumusan masalah yang telah dirumuskan.

1. **Praktik Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang**

Praktik penyusunan laporan keuangan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan tidak hanya mencakup proses pencatatan transaksi, tetapi juga melibatkan tahapan perencanaan, verifikasi, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami, dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui bagaimana praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa sebagai informan penelitian. Hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan tahapan penyusunan

laporan keuangan yang meliputi pengumpulan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi dokumen, pencatatan dan penginputan transaksi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun hasil penelitian mengenai praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pengumpulan Dokumen dan Bukti Transaksi

Pengumpulan dokumen dan bukti transaksi merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa. Seluruh transaksi keuangan yang terjadi harus didukung oleh dokumen yang sah sebagai bukti bahwa kegiatan dan penggunaan anggaran benar-benar telah dilaksanakan. Dokumen tersebut dapat berupa kwitansi, nota pembelian, bukti transfer, daftar penerima honorarium, surat perintah pembayaran, maupun dokumen pendukung lainnya. Kelengkapan dokumen menjadi dasar dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengumpulan dokumen dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan agar seluruh transaksi dapat terdokumentasi dengan baik.

Untuk mengetahui bagaimana proses pengumpulan dokumen dan bukti transaksi dilakukan di Kelurahan Kassa, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Setiap ada kegiatan atau pengeluaran, kami langsung mengumpulkan bukti-bukti transaksinya seperti kwitansi, nota pembelian, bukti transfer, daftar penerima honor, dan dokumen pendukung lainnya. Biasanya setelah kegiatan selesai, dokumen

tersebut diserahkan kepada saya untuk diperiksa dan disimpan sebagai dasar pencatatan dalam SIPD.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa proses pengumpulan dokumen dan bukti transaksi dilakukan secara berkelanjutan setiap kali terjadi transaksi keuangan. Seluruh dokumen pendukung dikumpulkan sebagai dasar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Sejalan dengan pernyataan Bendahara tersebut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Kami selalu mengingatkan setiap pelaksana kegiatan agar melengkapi dokumen pertanggungjawaban setelah kegiatan dilaksanakan. Semua bukti transaksi harus dikumpulkan karena itu menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran.”⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pihak kelurahan menekankan pentingnya kelengkapan dokumen transaksi sebagai bentuk tertib administrasi dan dasar dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pengumpulan dokumen dan bukti transaksi menjadi tahap awal yang penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, peneliti menggali informasi mengenai jenis dokumen dan bukti transaksi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Dokumen yang biasa kami kumpulkan antara lain kwitansi, nota pembelian, bukti transfer bank, daftar tanda terima honor, surat

⁵⁶ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁵⁷ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

tugas, dokumentasi kegiatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai dokumen administrasi dan bukti transaksi digunakan sebagai dasar pencatatan dan penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa.

Senada dengan pernyataan tersebut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyampaikan bahwa:

“Semua dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran kami kumpulkan, mulai dari bukti belanja sampai dokumen pelaksanaan kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut nantinya menjadi lampiran dalam penyusunan SPJ dan laporan keuangan.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dokumen transaksi tidak hanya berfungsi sebagai bukti pengeluaran, tetapi juga sebagai pendukung penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan.

b. Verifikasi Dokumen

Setelah dokumen dan bukti transaksi terkumpul, tahap selanjutnya adalah verifikasi dokumen. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap dokumen yang akan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan telah lengkap, benar, dan sesuai dengan transaksi yang terjadi. Verifikasi juga bertujuan untuk menghindari kesalahan pencatatan, kekurangan dokumen, maupun ketidaksesuaian antara penggunaan anggaran dan bukti transaksi yang tersedia. Melalui proses verifikasi, aparatur kelurahan dapat memastikan bahwa data keuangan yang akan dicatat memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik dan lebih mudah dalam proses pemeriksaan maupun evaluasi.

⁵⁸ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁵⁹ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Untuk mengetahui bagaimana proses verifikasi dokumen dilakukan di Kelurahan Kassa, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Sebelum diinput ke SIPD, saya periksa dulu dokumennya. Saya lihat apakah kwitansi, nota, atau bukti lainnya sudah lengkap, ada tanda tangan yang diperlukan, dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kalau sudah lengkap baru saya lanjutkan ke proses pencatatan.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa verifikasi dokumen dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung sebelum transaksi dicatat ke dalam sistem.

Sejalan dengan pernyataan Bendahara tersebut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Sebelum laporan dibuat, kami memastikan dulu bahwa semua dokumen pendukung sudah lengkap dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa verifikasi dokumen merupakan langkah penting untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Verifikasi dokumen merupakan langkah penting untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendukung. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya menanyakan tindakan yang dilakukan apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai.

⁶⁰ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁶¹ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Kalau ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, biasanya saya kembalikan dulu kepada pelaksana kegiatan untuk dilengkapi. Setelah diperbaiki dan sudah sesuai, baru bisa diproses lebih lanjut.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dokumen yang belum lengkap tidak langsung diproses, melainkan harus dilengkapi terlebih dahulu agar sesuai dengan ketentuan administrasi.

Senada dengan pendapat Bendahara, Lurah Kelurahan Kassa menyampaikan bahwa:

“Kalau ada kekurangan dokumen, kami minta segera dilengkapi. Kami tidak ingin ada transaksi yang masuk ke laporan tanpa bukti yang jelas karena nantinya bisa menjadi temuan saat pemeriksaan.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kelengkapan dokumen menjadi perhatian utama dalam proses penyusunan laporan keuangan guna menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.

c. Pencatatan dan Penginputan Transaksi

Tahap pencatatan dan penginputan transaksi merupakan proses yang dilakukan setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai. Pada tahap ini, seluruh transaksi keuangan dicatat dan diinput ke dalam aplikasi SIPD Kelurahan berdasarkan bukti transaksi yang telah diverifikasi sebelumnya. Pencatatan dilakukan dengan memperhatikan akun dan kode rekening yang sesuai agar informasi keuangan dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Ketelitian dalam proses pencatatan sangat diperlukan karena kesalahan dalam penginputan data dapat memengaruhi

⁶² Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁶³ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

hasil laporan keuangan yang akan disusun. Oleh karena itu, pencatatan dan penginputan transaksi menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal.

Untuk mengetahui bagaimana proses pencatatan dan penginputan transaksi dilakukan di Kelurahan Kassa, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Setelah dokumen lengkap, saya menginput transaksi ke dalam SIPD sesuai jenis belanja dan kode rekeningnya. Semua transaksi yang sudah direalisasikan dicatat berdasarkan bukti yang ada supaya data di sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pencatatan transaksi dilakukan melalui aplikasi SIPD berdasarkan bukti transaksi yang telah diverifikasi sebelumnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa, yaitu:

“Penginputan dilakukan oleh bendahara melalui SIPD. Kami memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan SIPD membantu proses pencatatan transaksi menjadi lebih teratur dan terdokumentasi dengan baik.

Pencatatan transaksi harus dilakukan secara tepat agar menghasilkan informasi keuangan yang akurat. Oleh karena itu, peneliti

⁶⁴ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁶⁵ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

selanjutnya menggali informasi mengenai cara memastikan kesesuaian akun dan kode rekening dalam proses penginputan transaksi.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Sebelum menginput, saya melihat dulu jenis belanjanya lalu menyesuaikan dengan akun dan kode rekening yang tersedia di SIPD. Kalau ada yang kurang jelas biasanya saya koordinasikan dengan pihak kecamatan.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kesesuaian akun dan kode rekening ditentukan berdasarkan jenis transaksi dan ketentuan yang terdapat dalam SIPD.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bendahara, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa mengemukakan bahwa:

“Kami berusaha mengikuti kode rekening yang sudah ditetapkan dalam sistem agar tidak terjadi kesalahan penginputan dan laporan yang dihasilkan tetap sesuai aturan.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan akun dan kode rekening yang sesuai menjadi bagian penting dalam menjaga ketepatan penyusunan laporan keuangan.

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Setelah seluruh transaksi dicatat ke dalam sistem, tahap berikutnya adalah rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang telah diinput dengan dokumen pendukung serta saldo kas yang tersedia agar data keuangan yang disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah dicatat secara lengkap, benar, dan sesuai dengan bukti yang tersedia. Setelah proses rekonsiliasi

⁶⁶ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁶⁷ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

selesai dan seluruh data dinyatakan sesuai, informasi keuangan kemudian diolah dan disusun menjadi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua laporan tersebut memuat informasi mengenai realisasi penggunaan anggaran dan menjadi dasar dalam pelaksanaan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan kepada instansi terkait.

Untuk mengetahui bagaimana proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan di Kelurahan Kassa, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Sebelum laporan dibuat, saya mencocokkan dulu semua transaksi yang ada di SIPD dengan bukti transaksi dan saldo kas yang tersedia. Tujuannya supaya tidak ada selisih antara data yang ada di sistem dan kondisi yang sebenarnya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data transaksi, dokumen pendukung, dan saldo kas.

Lebih lanjut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Kami memastikan bahwa data yang akan dilaporkan sudah diperiksa kembali dan sesuai dengan dokumen yang ada. Dengan begitu laporan yang dibuat lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.”⁶⁹

⁶⁸ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁶⁹ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa rekonsiliasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keakuratan dan keandalan laporan keuangan.

Rekonsiliasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan keakuratan data keuangan sebelum disajikan dalam bentuk laporan. Selanjutnya, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai laporan keuangan yang dihasilkan dari proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Di tingkat kelurahan kami menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan tersebut dibuat berdasarkan transaksi yang telah dicatat dan menjadi dasar pelaporan kepada pihak kecamatan.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa laporan yang disusun di tingkat kelurahan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Lebih lanjut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Laporan yang kami buat di kelurahan adalah LRA dan SPJ. Sedangkan laporan keuangan yang lebih lengkap nantinya dikonsolidasikan di tingkat yang lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan di tingkat kelurahan berfokus pada penyusunan LRA dan SPJ sebagai bentuk pelaporan penggunaan anggaran.

⁷⁰ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁷¹ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam proses penyusunan laporan keuangan adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan yang telah disusun selanjutnya disampaikan kepada instansi yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan selama satu periode tertentu. Proses ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Melalui pelaporan dan pertanggungjawaban, pihak yang berkepentingan dapat mengetahui bagaimana anggaran telah digunakan serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan dana yang telah direalisasikan.

Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan di Kelurahan Kassa, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Setelah laporan selesai dibuat, kami mencetak dan melengkapi seluruh dokumen pendukung. Setelah ditandatangani oleh Lurah, laporan tersebut disampaikan kepada pihak kecamatan untuk diperiksa dan diverifikasi.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyampaian laporan keuangan dilakukan setelah seluruh dokumen dan laporan dinyatakan lengkap serta mendapat persetujuan dari Lurah.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Setelah saya memeriksa dan menandatangani laporan, dokumen tersebut disampaikan ke kecamatan sesuai jadwal yang telah

⁷² Udy Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

ditentukan. Jika ada perbaikan, kami segera menindaklanjutinya.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyampaian laporan keuangan dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyampaian laporan keuangan merupakan bagian dari proses administrasi keuangan pemerintah. Selanjutnya, peneliti menanyakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa atas laporan keuangan yang telah disusun dan disampaikan.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang lengkap. Semua transaksi yang tercantum dalam laporan harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban keuangan dilakukan melalui penyampaian laporan yang didukung oleh dokumen transaksi yang lengkap dan sah.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami memastikan bahwa seluruh penggunaan anggaran dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan dapat diperiksa apabila sewaktu-waktu diperlukan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban keuangan di Kelurahan Kassa dilakukan melalui

⁷³ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁷⁴ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁷⁵ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

penyampaian laporan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kesesuaian Praktik Penyusunan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pedoman yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Penerapan SAP bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesesuaian praktik penyusunan laporan keuangan dengan SAP tidak hanya dilihat dari tersusunnya laporan keuangan, tetapi juga dari bagaimana transaksi keuangan diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kesesuaian dengan SAP menjadi aspek penting dalam menilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah.

Untuk mengetahui kesesuaian praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa sebagai informan penelitian. Hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan empat indikator utama, yaitu kesesuaian pengakuan, kesesuaian pengukuran, kesesuaian penyajian, dan kesesuaian pengungkapan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari masing-masing indikator tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. Kesesuaian Pengakuan

Kesesuaian pengakuan berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi atau kejadian keuangan dicatat dan diakui dalam laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengakuan yang tepat sangat penting karena akan memengaruhi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana praktik

pengakuan belanja dan aset serta penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.

Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Kalau penyusunan laporan keuangan di sini dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi dulu, seperti kwitansi, nota, dan dokumen kegiatan lainnya. Setelah itu baru dicatat dan disusun menjadi laporan keuangan. Dalam penyusunannya kami mengikuti format dan petunjuk yang sudah ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan SAP.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, proses penyusunan laporan keuangan diawali dengan pengumpulan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan. Selain itu, penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan mengacu pada format dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sejalan dengan pernyataan Bendahara tersebut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan kegiatan dan penggunaan anggaran yang sudah berjalan. Kami berusaha mengikuti aturan yang berlaku dan menyesuaikan dengan pedoman yang diberikan supaya laporan yang dibuat sesuai dengan ketentuan SAP.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, penyusunan laporan keuangan dilaksanakan berdasarkan kegiatan dan penggunaan anggaran

⁷⁶ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁷⁷ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

yang telah direalisasikan. Dalam pelaksanaannya, aparaturnya berupaya menyesuaikan proses penyusunan laporan keuangan dengan pedoman dan ketentuan SAP yang berlaku.

Setelah mengetahui proses penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, peneliti selanjutnya menggali informasi mengenai penerapan SAP berbasis akrual dalam praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah berjalan cukup baik. Saat ini kami menggunakan basis akrual sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi setiap transaksi dicatat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan didukung oleh dokumen yang lengkap.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, penerapan SAP berbasis akrual telah diterapkan dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Setiap transaksi dicatat berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan didukung oleh dokumen sebagai bukti pencatatan.

Senada dengan pendapat Bendahara, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyampaikan bahwa:

“Kalau secara umum penerapan SAP berbasis akrual sudah berjalan dengan baik. Kami mengikuti sistem dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga penyusunan laporan keuangan bisa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, penerapan SAP berbasis akrual telah dilaksanakan dengan mengikuti sistem dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya

⁷⁸ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁷⁹ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

upaya untuk menyesuaikan praktik penyusunan laporan keuangan dengan ketentuan SAP.

Selain penerapan basis akrual, aspek pengakuan transaksi juga menjadi bagian penting dalam penerapan SAP. Oleh karena itu, peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pengakuan belanja dan aset dalam penyusunan laporan keuangan.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Belanja dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah, seperti kwitansi dan nota pembayaran. Untuk aset, pencatatannya dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu aset dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, pengakuan belanja dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah, sedangkan pengakuan aset dilakukan setelah aset diterima dan dicatat dalam daftar inventaris barang. Praktik tersebut menunjukkan adanya prosedur pencatatan yang jelas dalam pengelolaan keuangan dan aset kelurahan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa yang menyatakan bahwa:

“Setiap pengeluaran harus ada bukti yang jelas sebelum dicatat. Begitu juga dengan aset, kalau barang sudah diterima dan menjadi milik kelurahan maka langsung didata dan dicatat sesuai prosedur yang berlaku.”^{81,82}

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, setiap transaksi belanja dan perolehan aset harus didukung oleh bukti yang jelas sebelum dilakukan pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengakuan belanja dan aset telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam pengelolaan keuangan kelurahan.

⁸⁰ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁸¹ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁸² Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

b. Kesesuaian Pengukuran

Selain pengakuan, aspek pengukuran juga menjadi bagian penting dalam penerapan SAP. Pengukuran berkaitan dengan dasar yang digunakan untuk menentukan nilai suatu transaksi atau aset yang dicatat dalam laporan keuangan. Ketepatan dalam pengukuran akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih andal dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mengetahui kesesuaian pengukuran yang diterapkan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.

Untuk mengetahui kesesuaian pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Nilai belanja dicatat sesuai jumlah yang tercantum pada bukti transaksi atau dokumen pembayaran. Kalau aset, nilainya diambil dari harga perolehan yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau pembelian barang.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, pengukuran belanja dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam bukti transaksi atau dokumen pembayaran yang sah. Sementara itu, pengukuran aset dilakukan berdasarkan harga perolehan yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau pembelian barang. Hal tersebut menunjukkan bahwa penentuan nilai belanja dan aset dilakukan berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Bendahara, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa mengemukakan bahwa:

⁸³ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

“Dalam menentukan nilai belanja dan aset kami mengacu pada dokumen yang ada. Jadi nilainya sesuai dengan harga yang tercantum dalam bukti pembelian atau dokumen pengadaan sehingga tidak ditentukan secara perkiraan.”⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, pengukuran belanja dan aset dilakukan dengan mengacu pada dokumen pendukung yang tersedia, seperti bukti pembelian dan dokumen pengadaan. Penentuan nilai dilakukan berdasarkan harga yang tercantum dalam dokumen tersebut sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan dan penyajian informasi keuangan.

c. Kesesuaian Penyajian

Penyajian laporan keuangan merupakan proses penyusunan informasi keuangan ke dalam format yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian yang sesuai dengan SAP akan memudahkan pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan disusun, pedoman yang digunakan, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan SAP.

Untuk mengetahui kesesuaian penyajian dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Ada. Kami menggunakan pedoman dan petunjuk teknis dari pemerintah daerah serta aturan yang berkaitan dengan SAP sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan.”⁸⁵

⁸⁴ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁸⁵ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa dilakukan dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah. Pedoman tersebut menjadi acuan bagi aparatur kelurahan dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Dalam penyusunan laporan keuangan kami mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan. Pedoman itu menjadi acuan supaya laporan yang dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, pedoman yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan pedoman tersebut membantu memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara terarah dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Keberadaan pedoman penyusunan laporan keuangan perlu didukung dengan penyajian laporan yang sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya menggali informasi mengenai proses penyajian laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan disusun mengikuti format yang sudah tersedia dari pemerintah daerah. Kami tinggal menyesuaikan data yang ada ke dalam format tersebut supaya sesuai dengan ketentuan SAP.”⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, penyajian laporan keuangan dilakukan dengan mengikuti format yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Data keuangan yang telah

⁸⁶ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁸⁷ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

dikumpulkan kemudian disusun sesuai format tersebut agar memenuhi ketentuan dalam SAP.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa, yaitu:

“Penyajian laporan dilakukan berdasarkan format yang sudah ditentukan. Dengan begitu laporan yang dibuat lebih mudah diperiksa dan sesuai dengan aturan yang berlaku.”⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, penggunaan format yang telah ditetapkan memudahkan proses pemeriksaan dan penilaian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan telah dilakukan secara sistematis sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Selain penyajian laporan keuangan, diperlukan pula pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa laporan yang disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Biasanya ada pemeriksaan dan evaluasi dari kecamatan maupun pemerintah daerah. Selain itu, kalau ada perubahan aturan atau petunjuk baru kami juga diberikan arahan dan pembinaan.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, kesesuaian laporan keuangan dengan SAP didukung oleh adanya pemeriksaan, evaluasi, serta pembinaan dari pihak kecamatan dan pemerintah daerah. Kegiatan tersebut membantu aparatur kelurahan dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku.

⁸⁸ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁸⁹ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Lebih lanjut, Rudy Hartono selaku urah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan dan koordinasi dengan pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut kami bisa mengetahui apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan.”⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan keuangan dan koordinasi dengan instansi terkait. Melalui evaluasi tersebut, kelurahan dapat mengetahui kekurangan yang masih ada dan melakukan perbaikan dalam proses penyusunan laporan keuangan.

d. Kesesuaian Pengungkapan

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap mengenai kondisi keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam SAP, informasi yang material dan relevan harus diungkapkan secara memadai agar laporan keuangan dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengetahui bagaimana pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan.

Untuk mengetahui kesesuaian pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Informasi mengenai penggunaan anggaran dan aset dicantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan data yang sudah dicatat

⁹⁰ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

sebelumnya. Semua informasi yang diperlukan dimasukkan sesuai dengan format laporan yang digunakan.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, informasi mengenai penggunaan anggaran dan aset diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan data dan dokumen yang telah dicatat sebelumnya. Pengungkapan tersebut dilakukan dengan mengikuti format laporan yang telah ditetapkan sehingga informasi yang disajikan dapat tersusun secara sistematis.

Sejalan dengan pernyataan Bendahara tersebut, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menjelaskan bahwa:

“Penggunaan anggaran dan aset dilaporkan sesuai kondisi yang sebenarnya agar informasi yang disampaikan jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang membutuhkan.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan dilakukan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai penggunaan anggaran dan aset dapat dipahami dengan jelas oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Setelah mengetahui bagaimana informasi keuangan diungkapkan dalam laporan keuangan, peneliti selanjutnya menggali informasi mengenai kelengkapan pengungkapan informasi yang diwajibkan dalam SAP serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Selama ini kami berusaha menyajikan seluruh informasi yang diperlukan sesuai ketentuan. Kalau ada kendala biasanya terkait

⁹¹ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁹² Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

kelengkapan dokumen atau penyesuaian terhadap aturan baru yang harus dipahami terlebih dahulu.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, Kelurahan Kassa telah berupaya menyajikan dan mengungkapkan seluruh informasi yang diwajibkan dalam SAP. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen pendukung dan penyesuaian terhadap perubahan aturan yang berlaku.

Senada dengan pendapat Bendahara, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyampaikan bahwa:

“Secara umum informasi yang diwajibkan sudah disajikan dalam laporan keuangan. Namun terkadang masih diperlukan penyesuaian jika ada perubahan aturan atau kebijakan dari pemerintah.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, sebagian besar informasi yang diwajibkan dalam SAP telah disajikan dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, perubahan kebijakan dan regulasi dari pemerintah terkadang menjadi tantangan yang memerlukan penyesuaian dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Selain kelengkapan pengungkapan informasi, laporan keuangan juga harus mampu mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan mengenai penilaian mereka terhadap kesesuaian laporan keuangan yang disusun dengan prinsip-prinsip tersebut serta ketentuan SAP yang berlaku.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah cukup mencerminkan transparansi dan akuntabilitas karena penyusunannya berdasarkan data dan bukti

⁹³ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁹⁴ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

yang ada. Selain itu laporan juga dibuat sesuai dengan format dan aturan yang berlaku.”⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, laporan keuangan yang disusun telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena didasarkan pada data serta bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penyusunan laporan juga mengacu pada format dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Ya, saya menilai laporan keuangan yang disusun sudah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap penggunaan anggaran dapat ditelusuri melalui dokumen pendukung yang ada. Selain itu, penyusunannya juga mengacu pada ketentuan SAP yang berlaku.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan tercermin dari adanya dokumen pendukung yang dapat digunakan untuk menelusuri setiap penggunaan anggaran. Selain itu, laporan keuangan disusun dengan mengacu pada ketentuan SAP sehingga informasi yang disajikan lebih dapat dipertanggungjawabkan.

3. Faktor–faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penerapan SAP di tingkat kelurahan. Kendala

⁹⁵ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁹⁶ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

tersebut dapat berasal dari faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun faktor administrasi dan koordinasi yang mendukung proses penyusunan laporan keuangan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa sebagai informan penelitian. Hasil wawancara kemudian dianalisis berdasarkan beberapa indikator, yaitu faktor sumber daya manusia (SDM), faktor sarana dan prasarana, faktor administrasi dan koordinasi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan SAP. Adapun hasil penelitian yang diperoleh diuraikan sebagai berikut.

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tingkat pemahaman, kompetensi, pengalaman, serta kemampuan aparatur dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan akan menentukan keberhasilan penerapan SAP. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui faktor sumber daya manusia yang menjadi penghambat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Kendala yang biasa kami hadapi itu lebih ke pemahaman aturan yang kadang berubah atau ada ketentuan baru yang harus dipelajari

lagi. Selain itu, tidak semua aparaturnya memiliki latar belakang di bidang akuntansi, jadi perlu waktu untuk menyesuaikan.”⁹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara, diketahui bahwa kendala dalam penerapan SAP di Kelurahan Kassa lebih banyak berkaitan dengan perubahan aturan dan keterbatasan latar belakang akuntansi aparaturnya, sehingga diperlukan penyesuaian dan pemahaman yang berkelanjutan.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Secara umum penerapan SAP sudah berjalan, tetapi kadang masih ada kesulitan dalam memahami aturan-aturan teknis yang cukup rinci. Karena itu kami sering berkoordinasi dengan pihak kecamatan atau instansi terkait jika ada hal yang belum dipahami.”⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah, penerapan SAP masih menghadapi kendala dalam pemahaman teknis aturan yang cukup rinci, sehingga diperlukan koordinasi dengan pihak kecamatan atau instansi terkait untuk memperjelas pelaksanaannya.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman aparaturnya terhadap konsep SAP berbasis akrual dalam pelaksanaannya, peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan kepada informan penelitian.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Di awal memang agak sulit memahami SAP berbasis akrual, terutama istilah-istilah akuntansi yang digunakan. Tapi karena sudah sering digunakan dan ada arahan dari pihak terkait, sekarang sudah lebih mudah dipahami.”⁹⁹

⁹⁷ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁹⁸ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

⁹⁹ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara menyampaikan bahwa pada awal penerapan SAP berbasis akrual terdapat kesulitan dalam memahami konsep dan istilah akuntansi yang digunakan. Namun seiring berjalannya waktu serta adanya pendampingan dan arahan dari pihak terkait, pemahaman aparatur terhadap konsep tersebut semakin meningkat dan lebih mudah diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Kalau kendala pasti ada, terutama saat ada aturan baru atau perubahan kebijakan. Biasanya kami perlu mempelajari kembali petunjuk yang diberikan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan.”¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyatakan bahwa kendala dalam memahami SAP berbasis akrual biasanya muncul ketika terjadi perubahan atau pembaruan kebijakan dari pemerintah. Kondisi tersebut mengharuskan aparatur untuk mempelajari kembali aturan yang baru agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan.

Selain itu, untuk mengetahui tingkat pemahaman aparatur kelurahan terhadap ketentuan dan prosedur SAP dalam penyusunan laporan keuangan, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Menurut saya pemahaman aparatur sudah cukup baik karena selama ini sering terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Walaupun begitu, tetap perlu pembaruan informasi dan bimbingan supaya pemahaman tetap sesuai dengan aturan terbaru.”¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara, tingkat pemahaman aparatur terhadap ketentuan SAP sudah tergolong cukup baik karena sudah terbiasa

¹⁰⁰ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹⁰¹ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei

terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, peningkatan pemahaman tetap diperlukan secara berkala agar aparatur dapat menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan perkembangan sistem akuntansi pemerintahan.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Secara umum aparatur sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, peningkatan kemampuan tetap diperlukan agar pelaksanaan SAP bisa lebih maksimal.”¹⁰²

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyampaikan bahwa secara umum aparatur telah memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, peningkatan kompetensi dan pemahaman teknis tetap diperlukan agar penerapan SAP dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui sejauh mana peran pelatihan atau sosialisasi dalam mendukung penerapan SAP di Kelurahan Kassa, peneliti juga menggali informasi melalui pertanyaan berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Pernah mengikuti beberapa pelatihan dan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Pelatihan itu cukup membantu karena memberikan pemahaman tentang aturan dan cara penyusunan laporan keuangan yang benar.”¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara menyampaikan bahwa pelatihan dan sosialisasi terkait SAP yang pernah diikuti memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman aparatur. Kegiatan

¹⁰² Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹⁰³ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei

tersebut membantu dalam memahami prosedur penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan serta memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Kami beberapa kali mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut sangat membantu karena memberikan informasi terbaru mengenai aturan dan prosedur yang harus diterapkan.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyatakan bahwa kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis sangat membantu aparatur dalam memahami aturan dan prosedur terbaru terkait pengelolaan keuangan. Selain itu, pelatihan tersebut juga menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang berlaku.

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sarana dan prasarana yang memadai dapat membantu aparatur dalam melaksanakan pencatatan, pengolahan data, serta penyusunan laporan keuangan secara lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan.

Untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

¹⁰⁴ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Secara umum sarana dan prasarana yang ada sudah cukup mendukung. Komputer dan aplikasi yang digunakan juga sudah membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan.”¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan Kassa seperti komputer, aplikasi, dan perangkat pendukung lainnya sudah cukup memadai dalam menunjang proses penyusunan laporan keuangan. Ketersediaan fasilitas tersebut membantu memperlancar proses pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAP.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Menurut saya fasilitas yang tersedia saat ini sudah cukup memadai untuk mendukung pekerjaan administrasi dan penyusunan laporan keuangan.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyampaikan bahwa secara umum fasilitas yang tersedia sudah cukup mendukung pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan di kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi sarana dan prasarana, penerapan SAP sudah didukung dengan cukup baik.

Selanjutnya, peneliti juga menggali informasi terkait kendala teknis yang mungkin terjadi dalam penggunaan aplikasi, sistem, maupun perangkat pendukung lainnya dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

¹⁰⁵ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹⁰⁶ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

“Kadang ada kendala jaringan internet yang kurang stabil atau aplikasi yang mengalami gangguan, tetapi biasanya tidak berlangsung lama dan bisa segera diatasi.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara menyatakan bahwa kendala teknis seperti gangguan jaringan internet atau sistem aplikasi kadang masih terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Namun demikian, kendala tersebut bersifat sementara dan masih dapat diatasi sehingga tidak terlalu menghambat proses pelaporan.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Kendala teknis sesekali memang ada, terutama saat sistem atau jaringan mengalami gangguan. Namun sejauh ini masih bisa ditangani sehingga tidak terlalu menghambat pekerjaan.”¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyatakan bahwa kendala teknis memang sesekali terjadi, terutama terkait jaringan atau sistem aplikasi. Meskipun demikian, kendala tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap proses penyusunan laporan keuangan karena masih dapat segera ditangani.

c. Faktor Administrasi dan Koordinasi

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga dipengaruhi oleh kelancaran administrasi dan koordinasi antaraparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Administrasi yang tertib serta koordinasi yang baik dapat mendukung proses penyusunan laporan keuangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, kendala dalam pengelolaan dokumen maupun koordinasi antaraparatur dapat memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

¹⁰⁷ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹⁰⁸ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Untuk mengetahui hambatan yang berkaitan dengan administrasi dan koordinasi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Selama ini koordinasi berjalan cukup baik. Kalau ada data atau dokumen yang dibutuhkan biasanya langsung dikomunikasikan dengan pihak yang terkait.”¹⁰⁹

Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antaraparatur dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa berjalan dengan cukup baik. Setiap aparatur saling berkomunikasi apabila terdapat kebutuhan data atau dokumen pendukung sehingga proses penyusunan laporan dapat berjalan secara lebih terarah.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Koordinasi antaraparatur cukup lancar karena masing-masing sudah memahami tugasnya. Jika ada kendala biasanya langsung dibahas bersama agar bisa segera diselesaikan.”¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyatakan bahwa koordinasi antaraparatur sudah berjalan cukup lancar karena masing-masing telah memahami tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini mendukung kelancaran dalam proses penyusunan laporan keuangan di kelurahan.

Selain koordinasi, peneliti juga menggali informasi terkait hambatan dalam administrasi dan pengelolaan dokumen yang mendukung penerapan SAP di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang.

¹⁰⁹ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹¹⁰ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Udy Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Kadang ada dokumen yang belum lengkap atau terlambat diserahkan, sehingga proses penyusunan laporan harus menunggu kelengkapan dokumen tersebut.”¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan administrasi yang terjadi umumnya berkaitan dengan keterlambatan atau ketidaklengkapan dokumen pendukung. Kondisi ini dapat mempengaruhi kelancaran proses penyusunan laporan keuangan karena diperlukan waktu tambahan untuk melengkapi dokumen tersebut.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Hambatan administrasi tidak terlalu sering terjadi, tetapi terkadang memang ada dokumen yang perlu dilengkapi kembali sebelum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan administrasi masih tergolong ringan, namun terkadang terdapat dokumen yang perlu dilengkapi kembali sebelum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketertiban administrasi masih perlu terus ditingkatkan.

d. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berbagai hambatan yang muncul dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memerlukan upaya penyelesaian agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan dengan baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, perbaikan sarana dan prasarana, maupun penguatan koordinasi dan administrasi. Dengan adanya upaya yang tepat, hambatan yang dihadapi

¹¹¹ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹¹² Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

dapat diminimalkan sehingga penerapan SAP dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bendahara dan Lurah Kelurahan Kassa. Adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Untuk mengatasi kendala yang ada, kami biasanya melakukan koordinasi dengan kecamatan atau instansi terkait. Selain itu, kami juga mengikuti sosialisasi dan mempelajari pedoman yang diberikan.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan SAP adalah melalui koordinasi dengan pihak kecamatan atau instansi terkait, serta mengikuti sosialisasi dan pedoman teknis yang diberikan. Hal ini dilakukan agar aparatur dapat terus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Kami berusaha meningkatkan pemahaman aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan koordinasi dengan pihak yang lebih memahami aturan SAP.”¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, Lurah menyatakan bahwa upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan dalam penerapan SAP.

¹¹³ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹¹⁴ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

Selanjutnya, untuk mengetahui faktor yang paling dominan menghambat penerapan SAP serta langkah yang dilakukan untuk mengatasinya, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian.

Udi Wahyudhy selaku Bendahara menyatakan bahwa:

“Menurut saya yang paling sering menjadi tantangan adalah memahami perubahan aturan dan ketentuan yang baru. Untuk mengatasinya, kami aktif mengikuti sosialisasi dan meminta arahan dari instansi terkait.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, faktor dominan yang menghambat penerapan SAP adalah perubahan regulasi yang terus berkembang sehingga aparatur harus terus melakukan penyesuaian. Untuk mengatasinya, dilakukan upaya seperti mengikuti sosialisasi dan meminta arahan dari instansi terkait secara berkelanjutan.

Sementara itu, Rudy Hartono selaku Lurah Kelurahan Kassa menyatakan bahwa:

“Faktor yang paling dominan biasanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap aturan yang terus berkembang. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi dan mengikuti pembinaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara, faktor dominan penghambat penerapan SAP adalah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi yang terus diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, pembinaan, dan pendampingan secara berkelanjutan agar penerapan SAP dapat berjalan lebih optimal.

¹¹⁵ Udi Wahyudhy, Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

¹¹⁶ Rudy Hartono, Lurah Kassa Kabupaten Pinrang, Wawancara pada 21 Mei 2026.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian pembahasan hasil penelitian ini, peneliti menguraikan dan menganalisis temuan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang. Pembahasan ini dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan teori dan konsep yang relevan, khususnya terkait pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh hasil temuan kemudian dibahas secara sistematis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, pembahasan dimulai dari rumusan masalah pertama sebagai fokus utama penelitian.

1. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang merupakan proses penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang dilakukan melalui tahapan pencatatan transaksi, pengumpulan bukti transaksi, penginputan data ke dalam sistem yang digunakan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga memastikan setiap transaksi keuangan dapat dicatat, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga dapat mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kelurahan.¹¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, diketahui bahwa praktik penyusunan laporan keuangan telah dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan mengikuti mekanisme yang berlaku dalam penggunaan aplikasi SIPD Penatausahaan.

¹¹⁷ Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016).

Proses penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan secara langsung dalam bentuk laporan akhir, melainkan melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan mulai dari pengumpulan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi dokumen, pencatatan dan penginputan transaksi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki fungsi dan peran yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tertib administrasi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹⁸

a. Pengumpulan Dokumen dan Bukti Transaksi

Tahap pertama dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa adalah pengumpulan dokumen dan bukti transaksi. Tahap ini menjadi dasar utama dalam seluruh proses penyusunan laporan keuangan karena setiap transaksi yang terjadi harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Berdasarkan hasil wawancara, dokumen yang dikumpulkan meliputi kwitansi, nota pembelian, bukti transfer, daftar penerima honorarium, surat tugas, dokumentasi kegiatan, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. Keberadaan dokumen tersebut menjadi bukti bahwa kegiatan dan transaksi yang dilaksanakan benar-benar terjadi sehingga dapat digunakan sebagai dasar pencatatan keuangan.

Proses pengumpulan dokumen dilakukan secara berkelanjutan selama pelaksanaan kegiatan. Setiap pelaksana kegiatan memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen pendukung kepada bendahara setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa Kelurahan Kassa telah menerapkan prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan. Kelengkapan dokumen tidak hanya diperlukan untuk kepentingan pencatatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan, audit, dan pertanggungjawaban keuangan. Semakin lengkap dokumen yang tersedia,

¹¹⁸ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: BPFE, 2019).

maka semakin mudah proses penyusunan laporan keuangan dilakukan serta semakin tinggi tingkat keandalan informasi yang dihasilkan.

Selain berfungsi sebagai dasar pencatatan, dokumen transaksi juga memiliki peranan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dokumen yang lengkap memudahkan proses pemeriksaan, rekonsiliasi, audit, maupun evaluasi terhadap penggunaan anggaran. Dengan demikian, pengumpulan dokumen dan bukti transaksi tidak hanya menjadi kegiatan administratif, tetapi juga merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal, tertib administrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁹

b. Verifikasi Dokumen

Setelah dokumen dan bukti transaksi terkumpul, tahap berikutnya adalah verifikasi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, verifikasi dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi, kesesuaian nilai transaksi, kejelasan bukti pengeluaran, serta keterkaitan antara transaksi dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Verifikasi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahap ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data keuangan sebelum dicatat ke dalam sistem.

Verifikasi dokumen juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan kelurahan. Apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka dokumen tersebut tidak langsung diproses, melainkan dikembalikan terlebih dahulu kepada pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan atau pelengkapan. Mekanisme ini menunjukkan adanya upaya dari aparaturnya kelurahan untuk

¹¹⁹ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Herianti, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

meminimalkan kesalahan pencatatan dan mencegah munculnya permasalahan dalam proses pelaporan keuangan. Dengan adanya verifikasi, data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan menjadi lebih valid dan dapat dipercaya.¹²⁰

Selain sebagai sarana pemeriksaan administrasi, verifikasi dokumen juga menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Melalui proses ini, aparatur kelurahan dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan tidak terdapat transaksi yang tidak memiliki dasar hukum maupun bukti yang memadai. Oleh karena itu, tahap verifikasi menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

c. Pencatatan dan Penginputan Transaksi

Tahap berikutnya adalah pencatatan dan penginputan transaksi ke dalam aplikasi SIPD Penatausahaan Kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh transaksi yang telah diverifikasi kemudian dicatat dan diinput ke dalam sistem sesuai dengan akun dan kode rekening yang telah ditentukan. Penggunaan SIPD dalam proses penyusunan laporan keuangan memberikan kemudahan bagi aparatur kelurahan karena seluruh transaksi dapat terdokumentasi secara sistematis dan terintegrasi dalam satu sistem informasi. Dengan adanya sistem tersebut, proses pencatatan menjadi lebih tertib, terorganisir, dan mudah untuk dipantau kembali apabila diperlukan.

Pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang sah dan telah melalui proses verifikasi sebelumnya. Setiap transaksi dicatat sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen pendukung sehingga data yang masuk ke dalam sistem benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

¹²⁰ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

Dalam praktiknya, pencatatan dilakukan sesegera mungkin setelah transaksi terjadi agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan dan untuk menghindari risiko lupa atau kehilangan informasi penting yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Langkah ini menunjukkan adanya upaya dari aparat kelurahan untuk menjaga ketepatan waktu pencatatan serta meningkatkan kualitas administrasi keuangan yang dimiliki.¹²¹

Selain mencatat transaksi belanja, bendahara juga melakukan pencatatan terhadap berbagai komponen lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan, termasuk pencatatan pajak yang timbul dari transaksi tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pajak yang telah dipotong kemudian dicatat dan disetorkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pencatatan di Kelurahan Kassa tidak hanya berfokus pada aspek pengeluaran anggaran, tetapi juga memperhatikan kewajiban administrasi lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, ketepatan pencatatan sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat dalam memahami akun dan kode rekening yang terdapat dalam sistem SIPD. Oleh karena itu, koordinasi dengan pihak kecamatan maupun instansi terkait sering dilakukan apabila terdapat transaksi yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan SIPD tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi, tetapi juga memerlukan pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar setiap transaksi dapat dicatat secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.¹²²

¹²¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

¹²² Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)” (Jakarta, 2019).

d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Setelah seluruh transaksi dicatat ke dalam sistem, tahap selanjutnya adalah rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi dilakukan dengan cara mencocokkan data transaksi yang terdapat dalam sistem dengan dokumen pendukung yang dimiliki serta saldo kas yang tersedia. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi telah tercatat dengan benar dan tidak terdapat perbedaan antara data administrasi dengan kondisi yang sebenarnya. Rekonsiliasi menjadi salah satu tahapan yang sangat penting karena kesalahan yang tidak terdeteksi pada tahap ini dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Proses rekonsiliasi juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap data yang telah dicatat sebelumnya. Melalui kegiatan ini, bendahara dapat mengetahui apakah terdapat transaksi yang belum dicatat, kesalahan penginputan data, maupun kekurangan dokumen yang perlu dilengkapi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan penelusuran kembali terhadap dokumen dan data transaksi hingga diperoleh informasi yang sesuai. Dengan demikian, rekonsiliasi berperan dalam menjaga keakuratan dan keandalan informasi keuangan sebelum disajikan dalam bentuk laporan.¹²³

Setelah seluruh data dinyatakan sesuai melalui proses rekonsiliasi, informasi keuangan kemudian diolah dan disusun menjadi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, laporan yang disusun pada tingkat kelurahan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). LRA digunakan untuk menggambarkan realisasi penggunaan anggaran selama satu periode tertentu, sedangkan SPJ berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban yang memuat rincian penggunaan dana beserta dokumen pendukung yang

¹²³ Irwan Taufiq Ritonga, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

melengkapinya. Kedua laporan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kelurahan.

Penyusunan LRA dan SPJ dilakukan berdasarkan data yang telah tersedia dalam aplikasi SIPD sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Selain itu, penggunaan SIPD juga membantu menciptakan keseragaman format laporan antar kelurahan karena seluruh laporan disusun berdasarkan sistem dan pedoman yang sama. Kondisi ini mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih tertib dan memudahkan pihak kecamatan maupun pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran di tingkat kelurahan.¹²⁴

e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam praktik penyusunan laporan keuangan adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Setelah laporan selesai disusun, bendahara melengkapi seluruh dokumen pendukung yang diperlukan dan menyerahkannya kepada lurah untuk diperiksa serta disahkan. Setelah mendapatkan persetujuan, laporan keuangan dan SPJ kemudian disampaikan kepada pihak kecamatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang telah dilaksanakan. Proses ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan dana publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa tidak hanya berupa penyampaian laporan tertulis, tetapi juga didukung oleh berbagai dokumen pendukung yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Dengan adanya dokumen tersebut, setiap transaksi dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan, audit, maupun evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur kelurahan telah berupaya menerapkan prinsip

¹²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.¹²⁵

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi dokumen, pencatatan dan penginputan transaksi ke dalam aplikasi SIPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak kecamatan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan telah dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai dengan mekanisme administrasi pemerintahan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori akuntansi sektor publik yang dikemukakan oleh Mardiasmo bahwa akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Melalui tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Kassa, terlihat bahwa fungsi akuntansi sektor publik sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan kelurahan.¹²⁶

Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori tahapan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang menyatakan bahwa proses penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui pencatatan transaksi, pengklasifikasian, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan keuangan secara sistematis sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penggunaan aplikasi SIPD dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan

¹²⁵ Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Jakarta: Indeks, 2018).

¹²⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021).

ketertiban administrasi serta menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Soffiana Safitri yang menemukan bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah desa dilakukan melalui tahapan administrasi keuangan yang sistematis sebagai dasar pertanggungjawaban pengelolaan dana publik. Meskipun objek penelitian berbeda, yaitu desa dan kelurahan, kedua penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan laporan keuangan memerlukan tahapan yang terstruktur agar laporan yang dihasilkan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Perbedaannya terletak pada kondisi penerapan SAP, dimana pada penelitian Sinta Soffiana Safitri ditemukan bahwa penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan SAP berbasis akrual, sedangkan pada Kelurahan Kassa proses penyusunan laporan keuangan telah didukung oleh penggunaan aplikasi SIPD dan mengacu pada mekanisme pelaporan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah.¹²⁷

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengumpulan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi dokumen, pencatatan dan penginputan transaksi melalui SIPD, rekonsiliasi dan penyusunan laporan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis seperti kelengkapan dokumen dan keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan, secara umum proses tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya dari aparaturnya kelurahan untuk mewujudkan

¹²⁷ Sinta Soffiana Safitri, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul", (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024).

pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kesesuaian Praktik Penyusunan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kesesuaian praktik penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan aspek yang sangat penting dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah, termasuk di tingkat kelurahan. SAP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai dasar dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan dalam pelaporan keuangan. Melalui penerapan SAP, setiap transaksi keuangan diharapkan dapat dicatat, diukur, dan dilaporkan secara sistematis sehingga menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹²⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam proses penyusunan laporan keuangan pada dasarnya telah dijadikan sebagai acuan utama oleh aparaturnya kelurahan dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan, meskipun tingkat penerapannya di lapangan masih menunjukkan variasi antara ketentuan normatif yang diatur dalam SAP dengan praktik operasional yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia di kelurahan, sehingga penerapan SAP belum sepenuhnya berjalan secara maksimal namun sudah berada pada tahap implementasi yang cukup baik.¹²⁹

¹²⁸ Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Herianti, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

¹²⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

Pada aspek kesesuaian secara umum terhadap SAP, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kassa telah berupaya mengikuti ketentuan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan, terutama dalam hal penggunaan format laporan, prosedur administrasi, serta mekanisme pencatatan dan pelaporan yang mengacu pada pedoman pemerintah daerah, di mana aparaturnya berusaha menyesuaikan setiap transaksi keuangan dengan aturan yang ada, meskipun dalam praktiknya masih terdapat penyesuaian teknis yang dilakukan berdasarkan kebiasaan kerja dan kondisi lapangan, sehingga kesesuaian dengan SAP lebih bersifat adaptif dibandingkan implementasi penuh secara teoritis.¹³⁰

Terkait dengan penerapan SAP berbasis akrual, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparaturnya Kelurahan Kassa sudah memiliki pemahaman dasar mengenai konsep akrual yang menekankan pada pengakuan transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul, bukan hanya saat kas diterima atau dikeluarkan, namun dalam praktiknya penerapan konsep tersebut masih belum sepenuhnya konsisten karena dalam beberapa kondisi pencatatan masih dilakukan dengan pendekatan yang lebih sederhana, sehingga implementasi basis akrual masih dalam tahap penyesuaian dan pembelajaran secara bertahap di lingkungan kelurahan.¹³¹

a. Kesesuaian Pengakuan (*Recognition*)

Dalam aspek pengakuan (*recognition*), hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Kassa telah menerapkan pengakuan transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas yang didukung oleh bukti transaksi yang sah, seperti kwitansi, nota pembelian, surat perintah

¹³⁰ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual” (Jakarta, 2021).

¹³¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

pembayaran, maupun dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, suatu transaksi baru dicatat dan diakui setelah benar-benar terjadi serta memiliki bukti administrasi yang lengkap. Sementara itu, aset diakui pada saat barang atau aset tersebut telah diterima dan menjadi hak penguasaan pemerintah kelurahan untuk digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pengakuan aset dilakukan berdasarkan dokumen perolehan yang sah sehingga keberadaan dan nilainya dapat dibuktikan secara administratif.¹³²

Penerapan pengakuan transaksi tersebut menunjukkan bahwa aparatur Kelurahan Kassa telah berupaya memastikan setiap transaksi yang dicatat memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi. Pengakuan yang dilakukan berdasarkan bukti transaksi juga membantu menjaga ketepatan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, meskipun transaksi keuangan di tingkat kelurahan relatif sederhana dibandingkan dengan organisasi pemerintah yang lebih besar, praktik pengakuan yang dilakukan telah mencerminkan prinsip dasar SAP dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kesesuaian Pengukuran (*Measurement*)

Dalam aspek pengukuran (*measurement*), hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan di Kelurahan Kassa dapat diketahui bahwa pengukuran transaksi keuangan telah dilakukan berdasarkan nilai yang tercantum dalam dokumen yang sah, seperti kwitansi, bukti pembayaran, dan dokumen pengadaan barang. Belanja diukur sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam bukti transaksi, sedangkan aset diukur berdasarkan harga perolehan yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau pembelian. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penentuan nilai transaksi tidak dilakukan

¹³² Deddi Nordiawan, *Akuntansi Pemerintahan* (Jakarta: Salemba Empat, 2020).

berdasarkan perkiraan atau penafsiran aparatur, melainkan mengacu pada dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Dengan demikian, proses pengukuran yang diterapkan telah memberikan dasar yang objektif dalam pencatatan transaksi keuangan di Kelurahan Kassa.

Pengukuran yang didasarkan pada bukti transaksi merupakan salah satu prinsip penting dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset pada umumnya diukur berdasarkan biaya perolehan (historical cost), sedangkan belanja dicatat sebesar nilai yang benar-benar dikeluarkan oleh entitas pemerintah. Penggunaan dasar pengukuran tersebut bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal, objektif, dan dapat diverifikasi. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan di Kelurahan Kassa telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip pengukuran yang diatur dalam SAP karena seluruh nilai transaksi ditentukan berdasarkan dokumen yang sah dan dapat dibuktikan.

Selain mendukung keandalan informasi keuangan, pengukuran yang dilakukan berdasarkan dokumen pendukung juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Nilai transaksi yang sesuai dengan bukti pembayaran maupun dokumen pengadaan memudahkan proses verifikasi, rekonsiliasi, serta pemeriksaan oleh pihak kecamatan maupun aparat pengawas. Dengan adanya dasar pengukuran yang jelas, risiko terjadinya kesalahan pencatatan, manipulasi nilai transaksi, maupun perbedaan informasi dalam laporan keuangan dapat diminimalkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran transaksi di Kelurahan Kassa telah mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³³

¹³³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Meskipun transaksi keuangan yang dikelola pada tingkat kelurahan relatif sederhana, pengukuran telah dilakukan secara konsisten berdasarkan nilai yang tercantum dalam dokumen resmi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang objektif dan andal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan aspek pengukuran dalam SAP telah dilaksanakan dengan cukup baik dan menjadi salah satu pendukung terciptanya pengelolaan keuangan kelurahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Kesesuaian Penyajian (*Presentation*)

Dalam aspek penyajian (*presentation*), hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan di Kelurahan Kassa telah disajikan sesuai dengan akun-akun dan format pelaporan yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pedoman yang diberikan oleh pemerintah daerah. Setiap transaksi yang telah dicatat dikelompokkan ke dalam akun yang sesuai sehingga informasi keuangan dapat tersusun secara sistematis dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Penyajian laporan keuangan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terdapat keseragaman dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah serta memudahkan proses pemeriksaan, evaluasi, dan pengawasan oleh instansi yang lebih tinggi.¹³⁴

Laporan keuangan yang disusun pada tingkat Kelurahan Kassa pada umumnya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran selama satu periode tertentu. Laporan-laporan tersebut

¹³⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

merupakan laporan yang memang diwajibkan untuk disusun pada tingkat kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, laporan yang telah disusun oleh kelurahan akan menjadi bagian dari proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan yang nantinya dikompilasikan dan disajikan secara lebih lengkap pada tingkat kabupaten sesuai dengan komponen laporan keuangan yang diatur dalam SAP.

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas karena seluruh penggunaan anggaran dilaporkan berdasarkan data dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan juga telah menggambarkan realisasi penggunaan anggaran serta kondisi aset yang dimiliki kelurahan sesuai dengan kebutuhan pelaporan pada tingkat kelurahan. Selain itu, laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan ketentuan mengenai jenis dan bentuk laporan yang wajib dibuat oleh pemerintah kelurahan, sehingga secara administratif telah memenuhi standar pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatakan telah cukup baik karena memenuhi karakteristik dasar laporan keuangan pemerintah, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam penyajian informasi yang lebih rinci dan pengungkapan yang lebih lengkap, namun secara umum laporan keuangan yang disusun oleh Kelurahan Kassa telah menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan SAP serta mampu

mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.¹³⁵

d. Kesesuaian Pengungkapan (*Disclosure*)

Selanjutnya pada aspek pengungkapan (*disclosure*), penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Kelurahan Kassa telah mencantumkan informasi utama terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, namun pengungkapan yang lebih mendalam seperti penjelasan kebijakan akuntansi, rincian transaksi tertentu, maupun informasi tambahan yang bersifat penjelasan (*notes to financial statements*) masih belum dilakukan secara optimal, sehingga aspek pengungkapan dalam laporan keuangan masih tergolong terbatas dan perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip transparansi yang diatur dalam SAP.¹³⁶

Terkait dengan kelengkapan informasi yang diwajibkan dalam SAP, aparatur kelurahan menyampaikan bahwa sebagian besar informasi pokok yang dibutuhkan dalam laporan keuangan sudah dapat disajikan dengan baik, namun masih terdapat beberapa elemen informasi yang belum sepenuhnya diungkapkan secara rinci, terutama yang berkaitan dengan penjelasan teknis akuntansi dan kebijakan pencatatan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP di Kelurahan Kassa masih berada pada tahap pengembangan dan belum mencapai tingkat kesempurnaan implementasi.

Dari sisi kebijakan, SOP, maupun pedoman tertulis, Kelurahan Kassa pada dasarnya mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah serta Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara nasional, namun tidak selalu memiliki pedoman teknis internal yang sangat rinci dan spesifik, sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari aparatur lebih banyak

¹³⁵ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

¹³⁶ Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua” (Jakarta:KSAP, 2010).

mengandalkan arahan teknis dari instansi di atasnya serta pengalaman kerja yang telah dimiliki, sehingga hal ini memengaruhi konsistensi dalam penerapan standar akuntansi secara penuh.¹³⁷

Dalam proses penyajian laporan keuangan, aparaturnya berupaya untuk menyesuaikan laporan yang disusun dengan ketentuan SAP agar dapat diterima oleh pihak kecamatan dan instansi terkait, sehingga laporan keuangan disusun secara formal, terstruktur, dan mengikuti format yang telah ditentukan, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyesuaian berdasarkan kemampuan teknis aparaturnya serta keterbatasan pemahaman terhadap seluruh detail standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.¹³⁸

Berdasarkan hasil wawancara, aparaturnya menilai bahwa laporan keuangan yang disusun telah cukup mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas karena setiap transaksi didasarkan pada bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan secara berkala kepada pihak yang berwenang, meskipun demikian masih terdapat ruang untuk perbaikan terutama dalam hal kelengkapan informasi dan kedalaman penjelasan laporan keuangan.

Namun demikian, jika ditinjau secara lebih mendalam berdasarkan prinsip-prinsip SAP, penerapan di Kelurahan Kassa masih belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa keterbatasan seperti pemahaman konsep akrual yang belum sepenuhnya matang, pengungkapan informasi yang masih terbatas, serta belum konsistennya penerapan seluruh komponen SAP secara menyeluruh, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

¹³⁷ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2018).

¹³⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terlihat dari proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang telah menerapkan aspek pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), dan penyajian (*presentation*) sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Transaksi keuangan diakui berdasarkan bukti transaksi yang sah, diukur berdasarkan nilai yang tercantum dalam dokumen pendukung, serta disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai format yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi SIPD Penatausahaan.

Namun, pada aspek pengungkapan (*disclosure*), hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP di Kelurahan Kassa belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan masih terbatas pada informasi pokok mengenai realisasi anggaran dan dokumen pertanggungjawaban, sedangkan informasi yang bersifat penjelasan, seperti kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian transaksi tertentu, maupun informasi tambahan yang diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap laporan keuangan belum diungkapkan secara memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pengungkapan masih belum dilaksanakan secara optimal.

Belum terpenuhinya aspek pengungkapan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan pemahaman aparatur mengenai ketentuan SAP, belum adanya pedoman teknis internal yang mengatur pengungkapan secara rinci pada tingkat kelurahan, serta terbatasnya jenis laporan keuangan yang wajib disusun di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, meskipun penerapan SAP di Kelurahan Kassa telah menunjukkan kesesuaian pada aspek pengakuan, pengukuran, dan penyajian, aspek pengungkapan masih memerlukan

peningkatan agar pelaksanaan SAP dapat diterapkan secara lebih menyeluruh sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.¹³⁹

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reski yang berjudul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)”. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Meskipun objek penelitian berbeda, hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa penerapan SAP yang dilakukan sesuai ketentuan mampu mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan.¹⁴⁰

Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yosi Nopitasari yang berjudul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penyusunan laporan operasional telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa penerapan SAP yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dapat menghasilkan

¹³⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

¹⁴⁰ Reski, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).” (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

informasi keuangan yang lebih tertib, sistematis, dan sesuai dengan standar yang berlaku.¹⁴¹

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang sudah berada pada tingkat yang cukup baik dan telah menunjukkan upaya adaptasi terhadap ketentuan yang berlaku, namun belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, khususnya dalam aspek pengungkapan, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi aparatur dan penguatan sistem pendukung agar penerapan SAP dapat berjalan lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan secara menyeluruh.

3. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

Faktor-faktor yang menghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang menjadi aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan karena penerapan SAP tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hambatan yang terjadi di lapangan menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana SAP dapat diimplementasikan secara optimal dalam praktik pengelolaan keuangan di tingkat kelurahan.¹⁴²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, dapat diketahui bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan masih menghadapi

¹⁴¹ Yosi Nopitasari, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi." (Universitas Islam Kuantan Singingi, 2022).

¹⁴² Mohamad Mahsun, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2012).

berbagai hambatan yang cukup kompleks dan saling berkaitan satu sama lain, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun aspek administrasi dan koordinasi, sehingga meskipun proses penyusunan laporan keuangan tetap berjalan, namun tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan SAP masih perlu ditingkatkan secara bertahap agar dapat mencapai kondisi yang lebih optimal sesuai standar yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.

a. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Faktor penghambat pertama yang sangat dominan adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam hal pemahaman aparatur terhadap konsep Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua aparatur kelurahan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau pengalaman teknis yang memadai dalam bidang keuangan pemerintahan, sehingga pemahaman terhadap konsep pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya mendalam, yang pada akhirnya berdampak pada cara penerapan SAP dalam kegiatan administrasi keuangan sehari-hari yang masih memerlukan penyesuaian dan arahan dari pihak yang lebih memahami.¹⁴³

Selain keterbatasan pemahaman dasar tersebut, tantangan lain yang dihadapi aparatur adalah adanya perubahan regulasi dan kebijakan dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang cukup dinamis dan terus mengalami pembaruan, sehingga aparatur kelurahan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam proses pencatatan dan pelaporan, namun dalam praktiknya proses adaptasi terhadap perubahan regulasi tersebut tidak selalu mudah karena

¹⁴³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi Offset, 2021).

membutuhkan waktu untuk memahami kembali aturan baru serta menyesuaikan prosedur kerja yang sudah berjalan sebelumnya.¹⁴⁴

b. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor penghambat selanjutnya adalah sarana dan prasarana, meskipun Kelurahan Kassa telah memiliki fasilitas dasar seperti komputer, perangkat administrasi, serta aplikasi pendukung pengelolaan keuangan, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, gangguan sistem aplikasi, serta keterbatasan optimalisasi penggunaan teknologi informasi, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menghambat kelancaran proses pencatatan dan pelaporan keuangan, terutama pada saat aparatur harus melakukan input data secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan.¹⁴⁵

Kendala teknis tersebut meskipun tidak terjadi setiap saat, namun tetap memberikan dampak terhadap efisiensi kerja aparatur, karena ketika terjadi gangguan sistem atau keterlambatan akses aplikasi, maka proses pencatatan harus ditunda atau dilakukan secara manual terlebih dahulu sebelum diinput ke dalam sistem, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan mengurangi efektivitas waktu kerja aparatur dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi keuangan.

c. Faktor Administrasi dan Koordinasi

Selanjutnya, faktor administrasi dan pengelolaan dokumen juga menjadi salah satu hambatan yang cukup berpengaruh dalam penerapan SAP, di mana berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan adanya kondisi ketidaklengkapan dokumen pendukung transaksi keuangan pada beberapa

¹⁴⁴ Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2019).

¹⁴⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).”

kegiatan, seperti kwitansi yang belum tertata dengan baik, bukti transaksi yang belum lengkap, atau arsip administrasi yang belum tersusun secara sistematis, sehingga aparatur perlu melakukan pengecekan ulang dan proses klarifikasi tambahan sebelum laporan keuangan dapat disusun secara final.¹⁴⁶

Ketidaklengkapan dokumen tersebut tidak hanya berdampak pada tahap pencatatan, tetapi juga berpengaruh terhadap proses verifikasi dan pelaporan, karena dalam prinsip akuntansi pemerintahan setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang sah, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka proses penyusunan laporan akan mengalami hambatan berupa keterlambatan waktu penyelesaian serta kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi data secara berulang.

Selain itu, faktor koordinasi antaraparatur juga turut memengaruhi kelancaran penerapan SAP di Kelurahan Kassa, meskipun secara umum koordinasi sudah berjalan cukup baik, namun dalam beberapa situasi masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian informasi atau data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, hal ini dapat terjadi karena adanya perbedaan beban kerja, keterbatasan waktu, serta belum sepenuhnya optimalnya komunikasi antarbagian dalam pengelolaan administrasi keuangan.¹⁴⁷

Perbedaan tingkat pemahaman antaraparatur terhadap prosedur teknis SAP juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi, karena tidak semua aparatur memiliki kemampuan yang sama dalam memahami mekanisme pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga dalam beberapa kondisi diperlukan penjelasan tambahan atau klarifikasi ulang agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penginputan data maupun penyusunan laporan

¹⁴⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.”

¹⁴⁷ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: BPFE, 2019).

akhir, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ketepatan dan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam menghambat penerapan SAP di Kelurahan Kassa adalah keterbatasan pemahaman aparatur terhadap konsep akuntansi pemerintahan berbasis akrual, karena hal ini merupakan dasar utama dalam seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap pengakuan transaksi, pengukuran nilai, hingga penyajian dan pelaporan, sehingga apabila pemahaman terhadap konsep dasar ini belum kuat maka akan berdampak pada seluruh rangkaian proses penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.¹⁴⁸

Selain faktor pemahaman, perubahan regulasi yang cukup cepat dan berkelanjutan juga menjadi faktor dominan lainnya, karena aparatur dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga tanpa adanya pelatihan dan pendampingan yang memadai, proses adaptasi terhadap perubahan tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik di lapangan.

Dalam upaya mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kelurahan Kassa telah melakukan beberapa langkah strategis seperti meningkatkan koordinasi dengan pihak kecamatan, mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi terkait, serta melakukan pembelajaran mandiri oleh aparatur dalam memahami ketentuan SAP secara lebih mendalam, meskipun upaya ini masih bersifat bertahap dan perlu ditingkatkan secara

¹⁴⁸ Jusmani, Edduar Hendri, dan Tpmi Bayu Kurniawan, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir”, *Jurnal Mediasi Akuntansi* 4, no 2 (2022).

berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal dalam jangka panjang.¹⁴⁹

Selain itu, aparatur juga berupaya memperbaiki sistem administrasi internal dengan meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan dokumen keuangan, seperti penataan arsip yang lebih rapi, peningkatan disiplin dalam pencatatan bukti transaksi, serta penguatan proses verifikasi sebelum laporan disusun, sehingga diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi dan mempercepat proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang masih menghadapi beberapa hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, perbedaan tingkat pemahaman aparatur terhadap SAP, serta terbatasnya pelatihan dan pendampingan teknis. Temuan tersebut sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keberhasilan penerapan SAP sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur yang mengelola keuangan pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahsun, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku karena aparatur dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, keterbatasan kompetensi aparatur dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan penerapan SAP yang optimal.¹⁵⁰

Selain faktor sumber daya manusia, teori juga menjelaskan bahwa pelatihan dan pendampingan teknis merupakan sarana penting dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam memahami perubahan regulasi dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Kurangnya pelatihan

¹⁴⁹ Reski, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah)". (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024).

¹⁵⁰ Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE, 2013).

dapat menyebabkan perbedaan tingkat pemahaman antaraparatur sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan SAP tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia yang didukung melalui pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jusmani, Edduar Hendri, dan Tomi Bayu Kurniawan yang menunjukkan bahwa meskipun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan, masih terdapat berbagai kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut berkaitan dengan kemampuan aparatur dan pelaksanaan proses administrasi keuangan yang belum sepenuhnya optimal. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa faktor sumber daya manusia dan pemahaman terhadap SAP masih menjadi tantangan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan di tingkat organisasi pemerintah.¹⁵¹

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, kurangnya pelatihan, kendala sarana dan prasarana, serta hambatan administrasi dan koordinasi, di mana seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penerapan SAP, dengan faktor paling dominan yaitu keterbatasan pemahaman aparatur terhadap konsep SAP berbasis akrual, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penguatan sistem

¹⁵¹ Jusmani, Edduar Hendri, dan Tomi Bayu Kurniawan, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir,” *Jurnal Mediasi Akuntansi* 4, no 2 (2022)

administrasi agar penerapan SAP dapat berjalan lebih optimal, konsisten, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari pengumpulan dokumen dan bukti transaksi, verifikasi dokumen, pencatatan dan penginputan transaksi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), rekonsiliasi data, penyusunan laporan keuangan, hingga proses pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku dan didukung oleh dokumen pendukung transaksi. Hasil dari proses tersebut berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala administratif seperti kelengkapan dokumen pendukung dan ketelitian dalam proses pencatatan yang perlu terus ditingkatkan.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa telah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, terutama dalam aspek pengakuan, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan. Penggunaan aplikasi SIPD turut mendukung penerapan SAP dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Namun, penerapan SAP berbasis akrual belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap konsep-konsep akuntansi pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan informasi keuangan. Oleh karena itu, penerapan SAP di Kelurahan Kassa masih bersifat bertahap dan memerlukan penguatan

kapasitas aparatur agar penerapannya dapat lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Faktor-faktor yang menghambat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang meliputi keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi yang terus berkembang, kurangnya pelatihan dan sosialisasi terkait SAP, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta hambatan administrasi dan koordinasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dari berbagai faktor tersebut, keterbatasan pemahaman aparatur terhadap konsep SAP berbasis akrual merupakan faktor yang paling dominan karena berpengaruh langsung terhadap proses pencatatan, penyusunan, dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan yang berkelanjutan, pendampingan teknis, serta penguatan sistem administrasi dan koordinasi agar penerapan SAP dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa mendatang.

1. Bagi Aparatur Kelurahan

Diharapkan aparatur kelurahan terus meningkatkan pemahaman dan kompetensi terkait Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), khususnya yang berbasis akrual, melalui pembelajaran mandiri maupun kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Selain itu, aparatur juga perlu lebih meningkatkan ketelitian dalam proses pencatatan dan pengelolaan dokumen keuangan agar laporan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan diharapkan dapat memperkuat koordinasi internal antar aparaturnya dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga setiap tahapan mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga pelaporan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, peningkatan kedisiplinan dalam pengelolaan administrasi dan arsip keuangan juga perlu terus diperhatikan agar tidak terjadi kendala dalam proses pelaporan.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih sering memberikan pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan teknis terkait penerapan SAP dan penggunaan aplikasi SIPD kepada aparaturnya kelurahan. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, terutama dalam hal teknologi dan jaringan sistem informasi, juga sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran proses penyusunan laporan keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel atau fokus kajian yang lebih luas, seperti efektivitas penerapan SIPD atau evaluasi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan kelurahan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, Puji, et al. “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pencatatan Manual Studi Kasus Di Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Bengkalis.” *Indonesian Journal of Innovation Science and Knowledge* 1, no. 3 (2024).
- Badudu, J.S, dan Sutan Mohammad Zain. *Efektivitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks, 2009.
- Emzir. *Analisis Data: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Frihatni, A. A, Nirwana, dan Syamsuddin, “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Parepare,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no 3 (2021).
- Halim, Abdul. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Halim, Abdul, dan Muhammad Syam Kusufi. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hartono, Rudy. “Lurah Kassa Kabupaten Pinrang,” 2026.
- Indrayani. *Modul akuntansi Sektor Publik*. Parepare: IAIN Parepare, 2022.
- Jusmani, Edduar Hendri, dan Tomi Bayu Kurniawan. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Di

- Pemerintah Daerah Ogan Komering Ilir.” *Jurnal Mediasi Akuntansi* 4, no. 2 (2022).
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tantang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).” Jakarta, 2019.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. “Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.” Jakarta, 2021.
- Loon, JF. Glastra van, dan dalam Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mahmudi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga, 2016.
- Mahsun, Mohamad. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Meliala, Tulis S., Noko Silitonga, and Timbul Sinaga. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Semesta Media, 2007.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Mohamad Mahsun. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nopitasari, Yosi. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Berbasis Akrual Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi.” Universitas Islam Kuantan Singingi, 2022.

- Nordiawan, Deddi, dan Ayuningtyas Herianti. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.
- Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.” Jakarta, 2010.
- Rahmawati, Dewi. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Pemerintah Desa Dan Kelurahan.” *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* 5, no. 1 (2020).
- RESKI. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Badan Pusat Statistik Parepare (Analisis Akuntansi Syariah).” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Ritonga, Irfan. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.
- Safitri, Sinta Soffiana. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Desa Kemuningsari Kidul.” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Sari, Nita, and Andi Putra. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Publik* 8, no. 1 (2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Wahyudhy, Udi. “Bendahara Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang,” 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
	JL. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307
INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : CINTA
NIM : 2220203862202012
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI
KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

A. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana proses pengumpulan dokumen dan bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa?
2. Dokumen atau bukti transaksi apa saja yang biasanya dikumpulkan dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan?
3. Bagaimana proses verifikasi dokumen dilakukan sebelum transaksi dicatat ke dalam sistem atau laporan keuangan?

4. Apa yang dilakukan apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi?
5. Bagaimana proses pencatatan dan penginputan transaksi keuangan ke dalam aplikasi SIPD Kelurahan?
6. Bagaimana cara memastikan bahwa transaksi yang diinput telah sesuai dengan akun dan kode rekening yang berlaku?
7. Bagaimana proses rekonsiliasi antara data transaksi, dokumen pendukung, dan saldo kas sebelum laporan keuangan disusun?
8. Laporan keuangan apa saja yang dihasilkan dari proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa?
9. Bagaimana prosedur penyampaian laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada pihak kecamatan atau instansi terkait?
10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa atas laporan keuangan yang telah disusun?

B. Kesesuaian Praktik Penyusunan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa dan sejauh mana proses tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?
2. Apakah penerapan SAP berbasis akrual telah berjalan dengan baik di Kelurahan Kassa? Mohon dijelaskan praktik penerapannya.
3. Bagaimana pengakuan belanja dan aset dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, serta apakah telah sesuai dengan ketentuan SAP?
4. Bagaimana cara menentukan nilai atau pengukuran belanja dan aset yang dicatat dalam laporan keuangan?
5. Apakah terdapat kebijakan, SOP, atau pedoman tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP?
6. Bagaimana penyajian laporan keuangan dilakukan agar sesuai dengan format dan ketentuan yang diatur dalam SAP?

7. Bagaimana pengungkapan informasi terkait penggunaan anggaran dan aset dilakukan dalam laporan keuangan?
8. Apakah seluruh informasi yang diwajibkan dalam SAP telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Jika belum, apa kendalanya?
9. Bagaimana bentuk pengawasan, pembinaan, atau evaluasi yang dilakukan untuk memastikan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah laporan keuangan yang disusun saat ini telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan SAP? Mengapa? Apakah laporan keuangan yang disusun telah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas?

C. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa?
2. Apakah terdapat kendala dalam memahami konsep SAP berbasis akrual? Jika ada, kendala apa yang paling sering dihadapi?
3. Bagaimana tingkat pemahaman aparatur kelurahan terhadap ketentuan dan prosedur SAP dalam penyusunan laporan keuangan?
4. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait SAP? Sejauh mana pelatihan tersebut membantu dalam pelaksanaan tugas?
5. Apakah sarana, prasarana, aplikasi, dan sistem yang tersedia saat ini sudah mendukung penerapan SAP?
6. Apakah pernah mengalami kendala teknis, seperti masalah aplikasi, jaringan internet, atau perangkat komputer dalam proses penyusunan laporan keuangan?
7. Apakah terdapat hambatan dalam koordinasi antaraparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?
8. Apakah terdapat hambatan dalam administrasi atau pengelolaan dokumen yang mendukung penerapan SAP?

9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan SAP?
10. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling dominan menghambat penerapan SAP dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya?

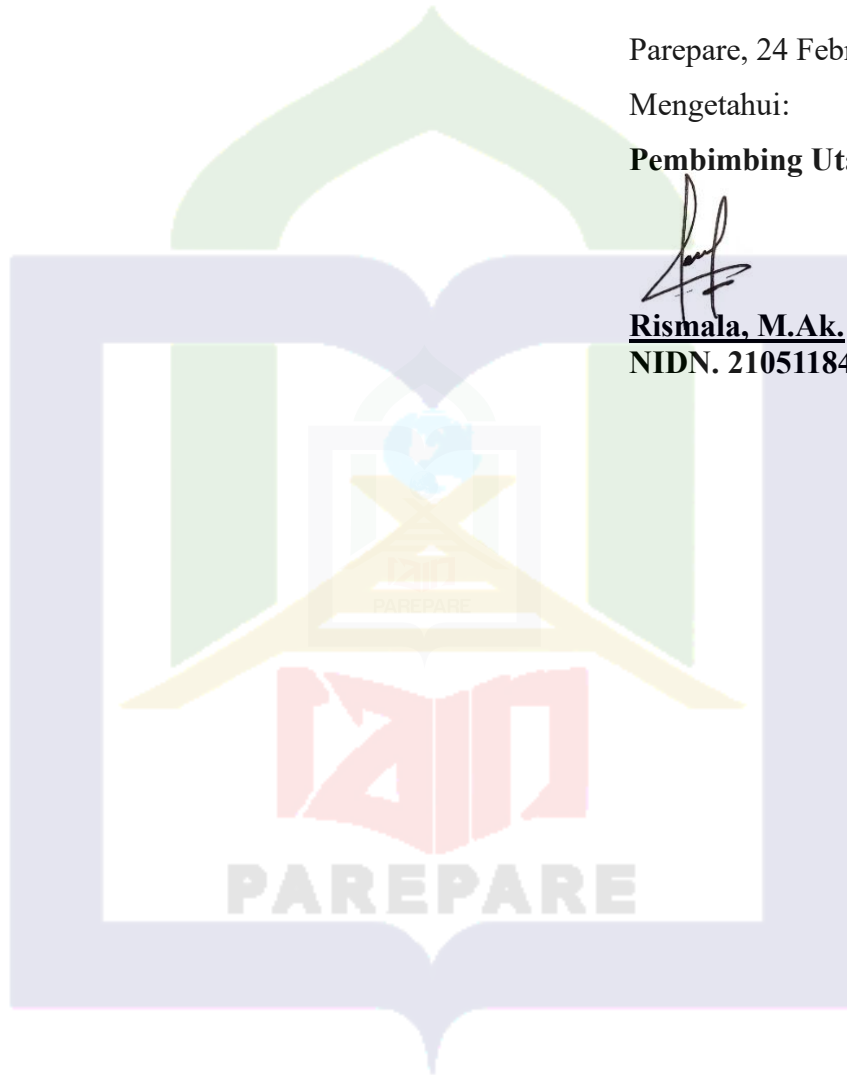
Parepare, 24 Februari 2026

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Rismala, M.Ak.
NIDN. 2105118403



Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

A. Praktik Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang

1. Bagaimana proses pengumpulan dokumen dan bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa?

Jawaban: “Setiap ada kegiatan atau pengeluaran, kami langsung mengumpulkan bukti-bukti transaksinya seperti kwitansi, nota pembelian, bukti transfer, daftar penerima honor, dan dokumen pendukung lainnya. Biasanya setelah kegiatan selesai, dokumen tersebut diserahkan kepada saya untuk diperiksa dan disimpan sebagai dasar pencatatan dalam SIPD.”

2. Dokumen atau bukti transaksi apa saja yang biasanya dikumpulkan dan digunakan dalam penyusunan laporan keuangan?

Jawaban: “Dokumen yang biasa kami kumpulkan antara lain kwitansi, nota pembelian, bukti transfer bank, daftar tanda terima honor, surat tugas, dokumentasi kegiatan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran.”

3. Bagaimana proses verifikasi dokumen dilakukan sebelum transaksi dicatat ke dalam sistem atau laporan keuangan?

Jawaban: “Sebelum diinput ke SIPD, saya periksa dulu dokumennya. Saya lihat apakah kwitansi, nota, atau bukti lainnya sudah lengkap, ada tanda tangan yang diperlukan, dan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kalau sudah lengkap baru saya lanjutkan ke proses pencatatan.”

4. Apa yang dilakukan apabila ditemukan dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi?

Jawaban: “Kalau ada dokumen yang kurang atau tidak sesuai, biasanya saya kembalikan dulu kepada pelaksana kegiatan untuk dilengkapi. Setelah diperbaiki dan sudah sesuai, baru bisa diproses lebih lanjut.”

5. Bagaimana proses pencatatan dan penginputan transaksi keuangan ke dalam aplikasi SIPD Kelurahan?

Jawaban: “Setelah dokumen lengkap, saya menginput transaksi ke dalam SIPD sesuai jenis belanja dan kode rekeningnya. Semua transaksi yang sudah direalisasikan dicatat berdasarkan bukti yang ada supaya data di sistem sesuai dengan kondisi sebenarnya.”

6. Bagaimana cara memastikan bahwa transaksi yang diinput telah sesuai dengan akun dan kode rekening yang berlaku?

Jawaban: “Sebelum menginput, saya melihat dulu jenis belanjanya lalu menyesuaikan dengan akun dan kode rekening yang tersedia di SIPD. Kalau ada yang kurang jelas biasanya saya koordinasikan dengan pihak kecamatan.”

7. Bagaimana proses rekonsiliasi antara data transaksi, dokumen pendukung, dan saldo kas sebelum laporan keuangan disusun?

Jawaban: “Sebelum laporan dibuat, saya mencocokkan dulu semua transaksi yang ada di SIPD dengan bukti transaksi dan saldo kas yang tersedia. Tujuannya supaya tidak ada selisih antara data yang ada di sistem dan kondisi yang sebenarnya.”

8. Laporan keuangan apa saja yang dihasilkan dari proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa?

Jawaban: “Di tingkat kelurahan kami menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Laporan tersebut dibuat berdasarkan transaksi yang telah dicatat dan menjadi dasar pelaporan kepada pihak kecamatan.”

9. Bagaimana prosedur penyampaian laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada pihak kecamatan atau instansi terkait?

Jawaban: “Setelah laporan selesai dibuat, kami mencetak dan melengkapi seluruh dokumen pendukung. Setelah ditandatangani oleh Lurah, laporan tersebut disampaikan kepada pihak kecamatan untuk diperiksa dan diverifikasi.”

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa atas laporan keuangan yang telah disusun?

Jawaban: “Bentuk pertanggungjawabannya yaitu dengan menyampaikan laporan keuangan beserta dokumen pendukung yang lengkap. Semua transaksi yang tercantum dalam laporan harus bisa dibuktikan dengan dokumen yang sah.”

B. Kesesuaian Praktik Penyusunan Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan di Kelurahan Kassa dan sejauh mana proses tersebut mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

Jawaban: “Kalau penyusunan laporan keuangan di sini dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi dulu, seperti kwitansi, nota, dan dokumen kegiatan lainnya. Setelah itu baru dicatat dan disusun menjadi laporan keuangan. Dalam penyusunannya kami mengikuti format dan petunjuk yang sudah ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan SAP.”

2. Apakah penerapan SAP berbasis akrual telah berjalan dengan baik di Kelurahan Kassa? Mohon dijelaskan praktik penerapannya.

Jawaban: “Kalau secara umum penerapan SAP berbasis akrual sudah berjalan dengan baik. Kami mengikuti sistem dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga penyusunan laporan keuangan bisa disesuaikan dengan aturan yang berlaku.”

3. Bagaimana pengakuan belanja dan aset dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan, serta apakah telah sesuai dengan ketentuan SAP?

Jawaban: “Belanja dicatat berdasarkan bukti transaksi yang sah, seperti kwitansi dan nota pembayaran. Untuk aset, pencatatannya dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa terlebih dahulu. Setelah itu aset dimasukkan ke dalam daftar inventaris barang.”

4. Bagaimana cara menentukan nilai atau pengukuran belanja dan aset yang dicatat dalam laporan keuangan?

Jawaban: “Nilai belanja dicatat sesuai jumlah yang tercantum pada bukti transaksi atau dokumen pembayaran. Kalau aset, nilainya diambil dari harga perolehan yang tercantum dalam dokumen pengadaan atau pembelian barang.”

5. Apakah terdapat kebijakan, SOP, atau pedoman tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai SAP?

Jawaban: “Ada. Kami menggunakan pedoman dan petunjuk teknis dari pemerintah daerah serta aturan yang berkaitan dengan SAP sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan.”

6. Bagaimana penyajian laporan keuangan dilakukan agar sesuai dengan format dan ketentuan yang diatur dalam SAP?

Jawaban: “Laporan keuangan disusun mengikuti format yang sudah tersedia dari pemerintah daerah. Kami tinggal menyesuaikan data yang ada ke dalam format tersebut supaya sesuai dengan ketentuan SAP.”

7. Bagaimana pengungkapan informasi terkait penggunaan anggaran dan aset dilakukan dalam laporan keuangan?

Jawaban: “Biasanya ada pemeriksaan dan evaluasi dari kecamatan maupun pemerintah daerah. Selain itu, kalau ada perubahan aturan atau petunjuk baru kami juga diberikan arahan dan pembinaan.”

8. Apakah seluruh informasi yang diwajibkan dalam SAP telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan? Jika belum, apa kendalanya?

Jawaban: “Informasi mengenai penggunaan anggaran dan aset dicantumkan dalam laporan keuangan berdasarkan data yang sudah dicatat sebelumnya. Semua informasi yang diperlukan dimasukkan sesuai dengan format laporan yang digunakan.”

9. Bagaimana bentuk pengawasan, pembinaan, atau evaluasi yang dilakukan untuk memastikan laporan keuangan telah sesuai dengan SAP?

Jawaban: “Secara umum informasi yang diwajibkan sudah disajikan dalam laporan keuangan. Namun terkadang masih diperlukan penyesuaian jika ada perubahan aturan atau kebijakan dari pemerintah.”

10. Menurut Bapak/Ibu, apakah laporan keuangan yang disusun saat ini telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan SAP? Mengapa? Apakah laporan keuangan yang disusun telah mencerminkan transparansi dan akuntabilitas?

Jawaban: “Menurut saya sudah cukup mencerminkan transparansi dan akuntabilitas karena penyusunannya berdasarkan data dan bukti yang ada. Selain itu laporan juga dibuat sesuai dengan format dan aturan yang berlaku.”

C. Faktor-faktor Penghambat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Kelurahan Kassa?

Jawaban: “Kendala yang biasa kami hadapi itu lebih ke pemahaman aturan yang kadang berubah atau ada ketentuan baru yang harus dipelajari lagi. Selain itu, tidak semua aparatur memiliki latar belakang di bidang akuntansi, jadi perlu waktu untuk menyesuaikan.”

2. Apakah terdapat kendala dalam memahami konsep SAP berbasis akrual? Jika ada, kendala apa yang paling sering dihadapi?

Jawaban: “Kalau kendala pasti ada, terutama saat ada aturan baru atau perubahan kebijakan. Biasanya kami perlu mempelajari kembali petunjuk yang diberikan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan.”

3. Bagaimana tingkat pemahaman aparatur kelurahan terhadap ketentuan dan prosedur SAP dalam penyusunan laporan keuangan?

Jawaban: “Secara umum aparatur sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, peningkatan kemampuan tetap diperlukan agar pelaksanaan SAP bisa lebih maksimal.”

4. Apakah pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait SAP? Sejauh mana pelatihan tersebut membantu dalam pelaksanaan tugas?

Jawaban: “Kami beberapa kali mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut sangat membantu karena memberikan informasi terbaru mengenai aturan dan prosedur yang harus diterapkan.”

5. Apakah sarana, prasarana, aplikasi, dan sistem yang tersedia saat ini sudah mendukung penerapan SAP?

Jawaban: “Secara umum sarana dan prasarana yang ada sudah cukup mendukung. Komputer dan aplikasi yang digunakan juga sudah membantu dalam proses penyusunan laporan keuangan.”

6. Apakah pernah mengalami kendala teknis, seperti masalah aplikasi, jaringan internet, atau perangkat komputer dalam proses penyusunan laporan keuangan?

Jawaban: “Kendala teknis sesekali memang ada, terutama saat sistem atau jaringan mengalami gangguan. Namun sejauh ini masih bisa ditangani sehingga tidak terlalu menghambat pekerjaan.”

7. Apakah terdapat hambatan dalam koordinasi antaraparatur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan?

Jawaban: “Selama ini koordinasi berjalan cukup baik. Kalau ada data atau dokumen yang dibutuhkan biasanya langsung dikomunikasikan dengan pihak yang terkait.”

8. Apakah terdapat hambatan dalam administrasi atau pengelolaan dokumen yang mendukung penerapan SAP?

Jawaban: “Kadang ada dokumen yang belum lengkap atau terlambat diserahkan, sehingga proses penyusunan laporan harus menunggu kelengkapan dokumen tersebut.”

9. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Kassa untuk mengatasi berbagai kendala dalam penerapan SAP?

Jawaban: “Untuk mengatasi kendala yang ada, kami biasanya melakukan koordinasi dengan kecamatan atau instansi terkait. Selain itu, kami juga mengikuti sosialisasi dan mempelajari pedoman yang diberikan.”

10. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling dominan menghambat penerapan SAP dan upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya?

Jawaban: “Faktor yang paling dominan biasanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap aturan yang terus berkembang. Karena itu, kami terus melakukan koordinasi dan mengikuti pembinaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku.”



Lampiran 3 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3494/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2025
- b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disertai tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 02 Desember 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2025
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024, tanggal 21 Pebruari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2025
- b. Menunjuk saudara: **Rismala, M.Ak**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
- Nama Mahasiswa : CINTA
- NIM : 2220203862202012
- Program Studi : Akuntansi Syari'ah
- Judul Penelitian : ANALISIS PRAKTIK PENCATATAN KEUANGAN PADA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN OPERASIONAL DI KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG
- c. Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 19 Juni 2025
Dekan.



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Lampiran 4 : Berita Acara Revisi Judul Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 Fax.24404
Po Box 909 Parepare 91100 website : www.iainpare.ac.id, email : mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : CINTA
N I M : 2220203862202012
Prodi : Akuntansi Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PRAKTIK PENCATATAN KEUANGAN PADA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN OPERASIONAL DI KELURAHAN KASSA
KABUPATEN PINRANG

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 14 Juli 2026

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Rismala, M.Ak

Mengetahui
Dekan,




Dr. Andri Bahri S, M.E., M.Fil. Ia .
NIP. 197811012009121003

Lampiran 5 : Surat Pengantar Penelitian dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1156/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2026 27 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 di
 KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : CINTA
 Tempat/Tgl. Lahir : PADANG LOLO, 24 April 2004
 NIM : 2220203862202012
 Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : PADANGLOLO, KELURAHAN KASSA, KECAMATAN BATULAPPA,
 KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Mei 2026 sampai dengan tanggal 04 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
 NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0226/PENELITIAN/DPMTSP/05/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-04-2026 atas nama CINTA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0230/R/T.Teknis/DPMTSP/04/2026, Tanggal : 29-04-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0217/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/04/2026, Tanggal : 29-04-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : CINTA
4. Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KELURAHAN KASSA KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : Pejabat Kelurahan Kassa
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Batulappa
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 29-10-2026.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Mei 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
KELURAHAN KASSA**

Jl. Poros Bamba - Batulappa No. ... Kode Pos 91253

SURAT KETERANGAN

Nomor : 041 / KK / VI / 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang menyatakan bahwa mahasiswa **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** :

Nama	: CINTA
NIM	: 2220203862202012
Tempat/Tgl Lahir	: Padanglolo, 24 April 2004
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Padanglolo, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis islam/Akuntansi Syariah

Benar-benar telah melakukan Penelitian mulai Tanggal 04 Mei 2026 s/d 04 Juni 2026 di Kantor Lurah, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang untuk menyusun Skripsi dengan Judul "**Analisis Penerapan Standar Akuntansi (SAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bamba, 04 Juni 2026

LURAH KASSA
RUDI HARTONO, S.E
NIP. 197307272002121013

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUDI HARTONO, SE**

Tempat Tanggal lahir : Pinrang, 27 Juli 1973

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Lurah Kassa

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Cinta yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 21 Mei 2026


(**RUDI HARTONO, SE**)



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UDI WAHYUDHY, SH

Tempat Tanggal lahir : Pinrang, 16 September 1979

Agama : Islam

Pekerjaan/Jabatan : Bendahara Kelurahan Kassa

Membenarkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Cinta yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



(UDI WAHYUDHY, SH)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Udi Wahyudhy selaku Bendahara Kelurahan Kassa
Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Rudy Hartono selaku Lurah Kassa Kabupaten Pinrang

Lampiran 9 : Laporan Pertanggungjawaban Keluaran Kassa



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SKPD : KECAMATAN BATULAPPA
Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (SPJ FUNGSIONAL) Bulan : Juni

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UPI/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UPI/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp547.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp462.518.715,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp197.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp112.518.715,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp197.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp112.518.715,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00
Kelurahan Kassa		Rp547.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp462.518.715,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp182.566.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp97.484.715,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp71.305.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.982.000,00	Rp0,00	Rp31.982.000,00	Rp31.982.000,00	Rp39.323.000,00
7.01.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp32.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.112.000,00	Rp0,00	Rp16.112.000,00	Rp16.112.000,00	Rp16.073.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.112.000,00	Rp0,00	Rp16.112.000,00	Rp16.112.000,00	Rp16.073.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.185.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.112.000,00	Rp0,00	Rp16.112.000,00	Rp16.112.000,00	Rp16.073.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.069.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.833.000,00	Rp0,00	Rp15.833.000,00	Rp15.833.000,00	Rp15.236.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.069.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.833.000,00	Rp0,00	Rp15.833.000,00	Rp15.833.000,00	Rp15.236.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp8.257.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.777.000,00	Rp0,00	Rp4.777.000,00	Rp4.777.000,00	Rp3.480.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp4.042.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.746.000,00	Rp0,00	Rp1.746.000,00	Rp1.746.000,00	Rp2.296.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp400.000,00	Rp400.000,00	Rp100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp18.270.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.910.000,00	Rp0,00	Rp8.910.000,00	Rp8.910.000,00	Rp9.360.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000,00	Rp0,00	Rp279.000,00	Rp279.000,00	Rp837.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp1.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000,00	Rp0,00	Rp279.000,00	Rp279.000,00	Rp837.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp1.116.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp279.000,00	Rp0,00	Rp279.000,00	Rp279.000,00	Rp837.000,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp39.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00	Rp23.250.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp39.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00	Rp23.250.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp39.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00	Rp23.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp39.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00	Rp23.250.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp39.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00	Rp23.250.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp39.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp0,00	Rp15.870.000,00	Rp15.870.000,00	Rp23.250.000,00
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp187.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp187.000,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp20.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp20.078.465,00	Rp621.535,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp20.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp20.078.465,00	Rp621.535,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp20.078.465,00	Rp621.535,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp0,00	Rp20.078.465,00	Rp20.078.465,00	Rp621.535,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp10.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.078.465,00	Rp0,00	Rp10.078.465,00	Rp10.078.465,00	Rp621.535,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp10.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.078.465,00	Rp0,00	Rp10.078.465,00	Rp10.078.465,00	Rp621.535,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.378.465,00	Rp0,00	Rp8.378.465,00	Rp8.378.465,00	Rp621.535,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp85.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.410.820,00	Rp0,00	Rp28.410.820,00	Rp28.410.820,00	Rp57.353.180,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp1.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp410.820,00	Rp1.353.180,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp410.820,00	Rp1.353.180,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp410.820,00	Rp1.353.180,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp410.820,00	Rp1.353.180,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp410.820,00	Rp1.353.180,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp1.764.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp0,00	Rp410.820,00	Rp410.820,00	Rp1.353.180,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp56.000.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp56.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp56.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp56.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp56.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp84.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp56.000.000,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00	Rp4.610.000,00	Rp4.610.000,00	Rp0,00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp365.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.034.000,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp365.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp365.034.000,00
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp350.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp350.000.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	Rp330.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp330.000.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	Rp125.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp125.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	Rp205.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.000.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	Rp20.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.000.000,00
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp15.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.034.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp15.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.034.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp15.034.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.034.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.534.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.534.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.534.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.562.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.562.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.272.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.272.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp9.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.500.000,00
JUMLAH		Rp547.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp462.518.715,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
LS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Pelimpahan:													
	Pelimpahan GU KKPD		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	Pelimpahan UP/GU		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.082.285,00	Rp10.199.000,00	Rp67.281.285,00	Rp67.281.285,00	Rp0,00
- Potongan:													
	1. Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	10. Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	11. Iuran Wajib Pegawai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	12. Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	15. Taperum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	16. Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	17. Askes		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	18. Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	19. Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.500,00	Rp0,00	Rp707.500,00	Rp707.500,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.120,00	Rp0,00	Rp213.120,00	Rp213.120,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp920.620,00	Rp0,00	Rp920.620,00	Rp920.620,00	Rp0,00
JUMLAH PENERIMAAN SP2D BRUTO			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00
- Pengeluaran:													
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp57.081.285,00	Rp0,00	Rp57.081.285,00	Rp57.081.285,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00
LS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
- Potongan:													

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
	1. Iuran Wajib Pegawai 8%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	10. Iuran Jaminan Kematian		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	11. Iuran Wajib Pegawai		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	12. Iuran Wajib Pegawai 1%		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	15. Taperum		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	16. Taspen		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	17. Askes		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	18. Lainnya		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	19. Sewa Rumah		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	20. Beras (BULOG)		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	21. Zakat		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	22. Jaminan Hari Tua		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	Total Potongan		Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
	- Pajak:												

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
3. PPH 21			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp707.500,00	Rp0,00	Rp707.500,00	Rp707.500,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp213.120,00	Rp0,00	Rp213.120,00	Rp213.120,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp920.620,00	Rp0,00	Rp920.620,00	Rp920.620,00	Rp0,00
- SPJ (Neto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.160.665,00	Rp0,00	Rp56.160.665,00	Rp56.160.665,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00	Rp28.000.000,00	Rp28.000.000,00	Rp0,00
LS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Pengembalian Pelimpahan UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.000,00	Rp0,00	Rp1.000,00	Rp1.000,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00	Rp85.081.285,00	Rp85.081.285,00	Rp0,00
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.199.000,00	Rp10.199.000,00	Rp10.199.000,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.199.000,00	Rp10.199.000,00	Rp10.199.000,00	Rp0,00

Menyetujui,

Disiapkan oleh,

PAREPARE

BIODATA PENULIS



CINTA. Lahir di Pinrang pada tanggal 24 April 2004. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Ancu dan Ibu Erni. Penulis berdomisili di Padanglolo, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari MI DDI Padanglolo pada tahun 2010-2016, penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah yaitu MTS DDI Padanglolo, lulus pada tahun 2019.

Kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Pinrang, lulus pada tahun 2022. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah (S.Akun.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan MBKM di Kantor Pertanahan Kota Parepare. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program S1 pada tahun 2026 dengan judul skripsi *“Aanalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Kelurahan Kassa Kabupaten Pinrang”*. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. dan seluruh pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberi kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat untuk orang banyak.

